



**ANALISIS DAYA SAING EKONOMI REGIONAL
KAWASAN TIMUR INDONESIA**

OLEH

AUDIE OLATE NIODE

6605000055

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Sains Ekonomi
pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**

DEPOK, 2008

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Audie Olate Niode
N. P. M. : 6605000055
Kekhususan : Ekonomi Regional
Judul Tesis : Analisis Daya Saing Ekonomi Regional
Kawasan Timur Indonesia

Depok, 21 Juli 2008

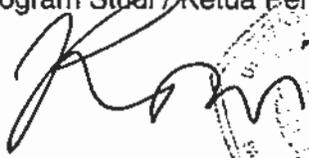
Pembimbing Tesis,


Dr. Nuzul Achjar

Penguji Tesis,


Dr. Suahasil Nazara

Sekretaris Program Studi / Ketua Penguji Tesis,


Prof. Dr. Nachrowi Djalal Nachrowi



ABSTRAK TESIS

ANALISIS DAYA SAING EKONOMI REGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA

Audie O. Niode
6605000055

Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Klasifikasi JEL : C0, C21, H20, I21, J38, O1, R11

Kata Kunci : 1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Daya Saing
3. Pajak Daerah
4. Pendidikan
5. Upah Minimum Provinsi
6. *Dynamic Shift-Share analysis*
7. *Pooled Least Squares*

Tesis ini dimotivasi dengan adanya perbedaan performa ekonomi yang dicapai provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan terus menjadi tujuan utama pemerintah baik untuk tingkat nasional maupun untuk daerah atau provinsi. Provinsi yang mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan bahwa wilayah tersebut relatif memiliki daya saing ekonomi.

Keseluruhan data bersifat *time series* 2000-2006 dengan *cross section*. Produk Domestik Regional Bruto delapan provinsi dan nasional didekomposisi dengan menggunakan model *dynamic shift-share analysis* untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi penggerak perekonomian di Kawasan Timur Indonesia. Selanjutnya dengan menggunakan metode estimasi *pooled least squares* diketahui pengaruh dari pajak daerah, pendidikan tenaga kerja, dan upah terhadap daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan sektor yang berpotensi sebagai penggerak perekonomian provinsi di Kawasan Timur Indonesia adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang paling menonjol diikuti sektor industri pengolahan, kemudian sektor listrik, gas dan air bersih, dan terakhir sektor perdagangan, hotel dan restoran. Provinsi yang memiliki kemampuan daya saing ekonomi regional tertinggi provinsi Sulawesi Tengah diikuti Sulawesi Tenggara kemudian Nusa Tenggara Barat, sedangkan provinsi lainnya memiliki daya saing rendah, secara berurutan Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua. Dari hasil Estimasi menunjukkan pajak daerah dan pendidikan tenaga kerja mempengaruhi daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia secara signifikan, sedangkan upah (UMP) walaupun koefisiennya sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu bertanda negatif namun tidak signifikan secara statistik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, hanya karena perkenan-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Proses pembuatan tesis ini tentunya tidak terlepas dari peran banyak pihak yang tidak saja banyak membantu penulis namun terlebih-lebih telah memberi dorongan, semangat dan simpati yang sangat besar artinya bagi penulis, sehingga memacu penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Peran mereka tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun karena begitu berharganya, dan hanya Tuhan YME kiranya yang dapat membalas jasa-jasa baik mereka.

Sedangkan dari penulis, dari lubuk hati yang paling dalam dan dengan segala kerendahan hati, penulis hanya dapat menyatakan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suahasil Nazara sebagai dosen dan penguji tesis yang dan memberikan banyak bimbingan serta masukan sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
2. Bapak Dr. Arindra A. Zainal, sebagai dosen dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
3. Bapak Dr. Nuzul Achjar sebagai dosen pembimbing tesis yang telah memberikan arahan dan petunjuk serta waktu yang berharga sehingga tesis dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Nachrowi Djalal Nachrowi sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia juga sebagai dosen dan ketua tim penguji tesis.
5. Seluruh dosen / staf pengajar yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Prof. Dr. Lepi Tarmidi, Dr. Ninasapti Triaswati, Dr. Sugiharso Safuan, Dr M. Ichsan, Dr. M. Syamsudin, Dr N. Haidy Pasay, Dr. Ari Kuncoro, Dr. Djajadi, Dr. Monthy Girianna, Dr. Dr. S. Priharsono, Dr. Omas B. Samosir, Dr. Mahyus Ekananda, Dr. Eugenia Mardanugraha, Dr. Djoni Hartono, Dr.A.V. Hardiyanto, Dr. Sahminan Pulungan, Dr. Beta G. Laksono, Dr Jossie Moeis. Dr. Totok, Dr Bagus S, Dr. Madaremmeng. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan pahala yang tiada putus. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman asisten mata kuliah, Mr Haikal, Ms Evy, Mrs Dhiny, Ms Ade Tatum, Mr Wawan, MrYusuf, Mr Ferry, Mr Syahrial, Mr Eko. Segenap karyawan/wati sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan karyawan/wati Perpustakaan Pasacasarjana FEUI yang telah banyak memberikan kelancaran dalam perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.
6. Rekan-rekan Pascasarjana Ilmu Ekonomi Depok Angkatan 2005, khususnya Arnold SH si Mr Hebat, Darwin Damanik si Mr Tangguh dan Ganang PS si Mr Jawara sebagai frentje yang selalu setia dalam

perjuangan menghabiskan target waktu studi. Spesial tenkyu buat Mr Taufik Hidayat, Non Amelia, Mba Rini Kusumastuti dan Mba Sulistina, Mba Palupi dan Non Ilwa yang memberikan masukan dan data. Kepada Mr Tono, Mr Paul Raubun, Mr Ireng Sungkono, Mr Afla, Ms Susy, Ms Dewy, Mrs Catur, Mrs Onyim, Mrs Lita, Mrs Rahmy, Ms Cherry, Ms Erry, Mrs Yulinar, Mrs Tety, Ms Elvy. Kepada rekan-rekan Salemba Mr Wilson Siahaan, Mr Akhmad, Mba Ratna, Ms Lisna, Ms Adel, Mr Dendy, Mr Victor, Mr Irwan Sinurat, Mba Waty dan Mba Zaenab. Kepada teman-teman Depok Non Eqa, Mba Ratna, Mr Herbert, Mr Arifin. Kepada teman-teman S3 Mr Amir, Mr Abdi Rizal, Mr Nyoman, Mba Mirza, Mr Soemarso, Mr Kemal, Mr Irwan Gregorius, Mr Wilson Radjaguguk, Mr Dicky, Mr Andy yang selalu memberi motivasi dan kepada rekan-rekan Lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kedekatan kita akan tetap terus terjaga. Sukses Ceria Sehat Enjoy Always.

7. Khususnya kepada keluarga tercinta Pap (alm), Mam, Kakak-kakak, Adik-adik serta keponakan-keponakan, juga Abang-abang yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta dukungannya. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.
8. Ibu Prof. Dra. I. Najooan-P, MS dan Mr Vekie A. Rimate, MS yang selalu mendorong dan memotivasi. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.
9. Mrs Rively sebagai Direktur Keuangan Kemahasiswaan FEUI dan Ms Romana Hutagalung & Novarina Ketaren dari Yayasan Mitra Mandiri atas bantuan Beasiswa Citybank selama studi di PPIE FEUI.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Saran dan kritik demi pengembangan tesis ini sangat penulis harapkan. Penulis hanya bisa berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan dapat menambah cakrawala pemikiran kita.

Juli 2008

Audie O. Niode

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL TESIS	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah Penelitian	8
1.3. Hipotesis	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Daya Saing	10
2.2. Analisis Shift-Share	11
2.2.1. Analisis Shift-Share Tradisional	12
2.2.2. Analisis Shift-Share Dinamis	14
2.3. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi	19
2.4. Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi	19
2.5. Upah dan Pertumbuhan Ekonomi	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Spesifikasi Model	23
3.1.1 Spesifikasi Model Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi Regional	23
3.1.2 Spesifikasi Dan Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	28
3.3 Defenisi Operasional Variabel	29
3.4 Kerangka Pikir Analisis	30
3.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	32

BAB IV GAMBARAN UMUM KAWASAN TIMUR INDONESIA	33
BAB V ANALISIS	38
5.1 Hasil Kalkulasi Model <i>Shift-Share</i> Dinamis	38
5.2 Sektor-Sektor Berpotensi Penggerak Perekonomian	47
5.3 Hasil Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional	48
5.4 Analisis Ekonomi	49
5.4.1 Pajak Daerah	50
5.4.2 Pendidikan Tenaga Kerja	50
5.4.3 Upah Minimum Provinsi (UMP)	51
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	52
6.1 Kesimpulan	52
6.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1.1. Persentase Pertumbuhan PDRB Provinsi KTI Periode Tahun 2000-2006	7
TABEL 4.1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan KTI Periode Tahun 2000-2006	33
TABEL 5.1. Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek Provinsi-Provinsi KTI Tahun 2000-2006 (Rp milyar)	38
TABEL 5.2. Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2006 (Rp milyar)	41
TABEL 5.3. Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2006 (Rp milyar)	42
TABEL 5.4. Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2006 (Rp milyar)	43
TABEL 5.5. Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2000-2006 (Rp milyar)	44
TABEL 5.6. Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2000-2006 (Rp milyar)	44
TABEL 5.7. Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000-2006 (Rp milyar)	45
TABEL 5.8. Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek Provinsi Maluku Tahun 2000-2006 (Rp milyar)	46
TABEL 5.9. Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek Provinsi Papua Tahun 2000-2006 (Rp milyar)	47
TABEL 5.10. Sektor-Sektor Berpotensi Penggerak Perekonomian Provinsi di KTI	48
TABEL 5.11. Rincian Hasil Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional	48
TABEL 5.12. Rincian Hasil Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional Dengan Metode Cross-Section Weights	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode Tahun 2000 – 2006	2
GAMBAR 1.2 Persentase Output Nasional dalam 3 Sektor Periode Tahun 2000 – 2006	3
GAMBAR 3.1 Diagram Kerangka Pikir Analisis	31
GAMBAR 4.1 Penduduk Provinsi Di KTI (ribuan jiwa)	34
GAMBAR 4.2 Pajak Daerah Provinsi Di KTI (Rp milyar)	35
GAMBAR 4.3 Upah Minimum Provinsi Di KTI (Rp ribuan)	36
GAMBAR 4.4 Pendidikan Tenaga Kerja (persen)	37
GAMBAR 5.1 PDRB 3 Sektor Provinsi Di KTI Tahun 2000 - 2006 (persen)	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1. PDRB Delapan Provinsi KTI Periode Tahun 2000 – 2006 (Rp milyar)	57
LAMPIRAN 2. PDRB Nasional (Rp milyar)	59
LAMPIRAN 3. Persentase Pertumbuhan PDRB Per Sektor Ekonomi Provinsi KTI Periode Tahun 2000 – 2006	60
LAMPIRAN 4. Persentase Pertumbuhan PDB Per Sektor Ekonomi Nasional Periode Tahun 2000 – 2006	62
LAMPIRAN 8. Hasil Regresi Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional	62
LAMPIRAN 9. Hasil Regresi dengan Metode Cross-Section Weights Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

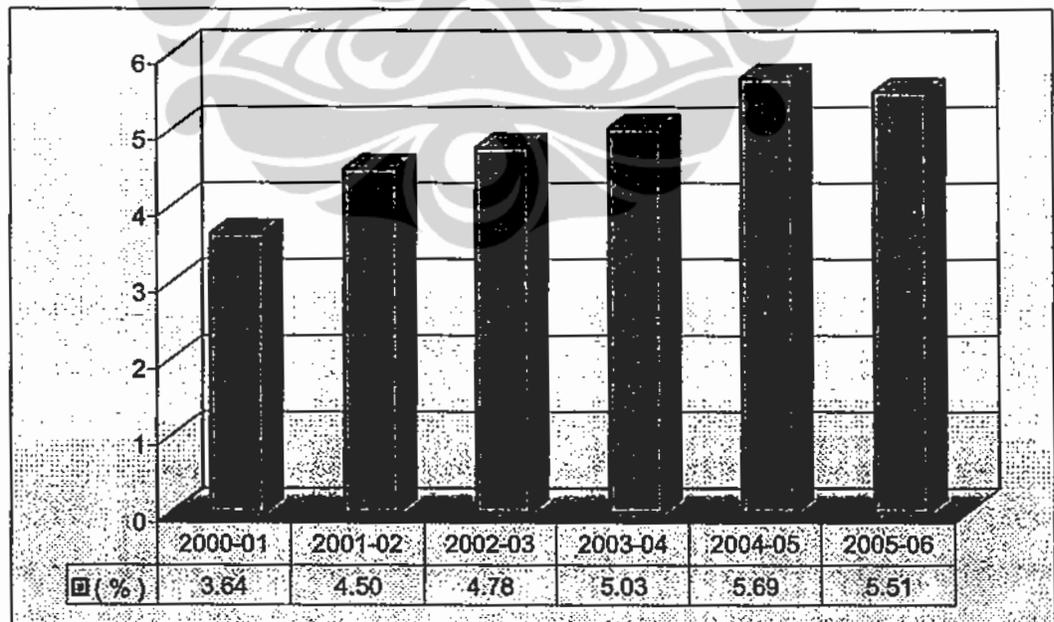
Pembangunan ekonomi merupakan keseluruhan proses politik dan ekonomi yang diperlukan untuk mempengaruhi transformasi struktural dan kelembagaan dari seluruh masyarakat demi menghasilkan rentetan kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat dan melalui proses yang efisien sebagian besar penduduk (Todaro, 2000). Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting dalam menganalisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat (Susanti dkk., 2000).

Menurut Djojohadikusumo (1994) terdapat perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas. Pembangunan ekonomi mencakup hal yang lebih luas dari sekedar peningkatan faktor produksi yaitu perubahan pada komposisi produksi, perubahan pola pembagian (distribusi) kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi adalah *necessary conditon* dan bukan *sufficient condition* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang diperlukan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi tapi juga berkualitas. Maksud pertumbuhan yang berkualitas adalah yang berkesinambungan (*sustainable*), artinya tidak rentan terhadap guncangan eksternal, efisien dalam menggunakan sumber daya alam dan terdistribusi secara baik bagi seluruh segmen masyarakat.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Tumbuhnya perekonomian dapat diartikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, karena kenaikan menunjukkan munculnya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Suatu perekonomian dikatakan berkembang apabila peningkatan pendapatan per kapita cenderung meningkat dalam jangka panjang. Pada gambar 1.1 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi nasional selang periode tahun 2000-2006 mencapai pertumbuhan positif. Pada tahun 2005 terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara nasional sebesar sekitar 120 persen. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi nasional sehingga pencapaian pertumbuhan ekonomi tetap positif namun menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Gambar 1.1

Persentase Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode Tahun 2000 – 2006



Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

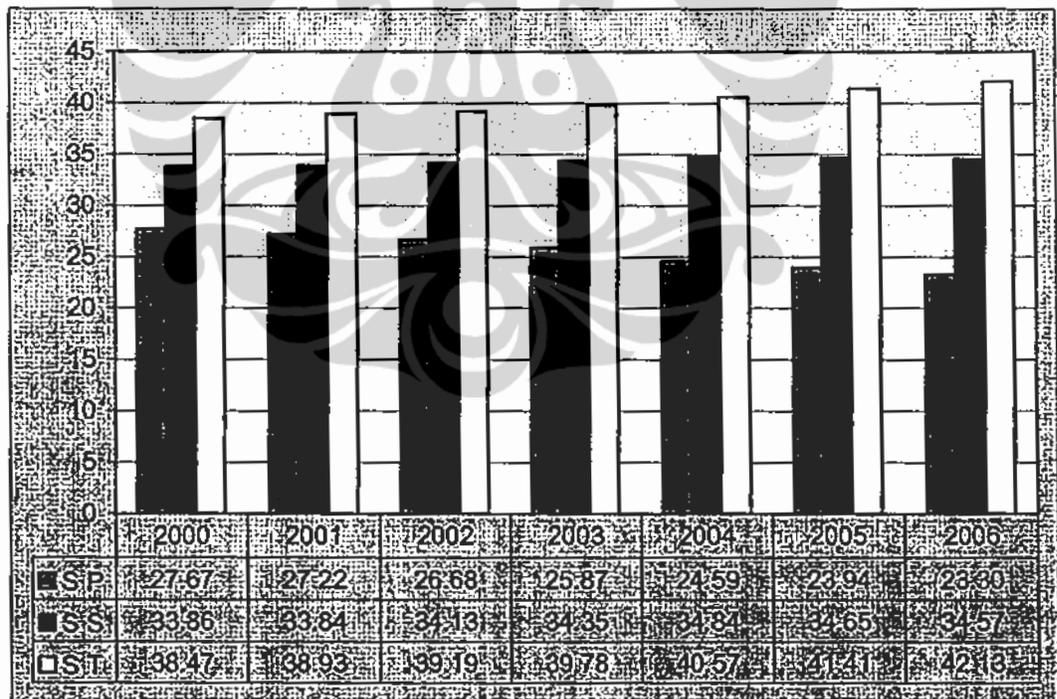
Pembangunan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut, yaitu dari ekonomi tradisional yang dititikberatkan pada sektor pertanian ke ekonomi

modern yang didominasi oleh sektor industri. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (1975)¹ tentang transformasi struktur ekonomi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Menurut Kuznets (1966)² perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan adanya pengalihan dari kegiatan pertanian ke nonpertanian, dari industri ke jasa.

Gambar 1.2 menunjukkan transformasi struktur perekonomian nasional. Selang periode tahun 2000-2006 terjadi pergeseran peran sektor ekonomi dalam pembentukan output nasional. Kontribusi sektor primer mengalami penurunan secara perlahan, sementara sektor sekunder dan sektor tersier mengalami peningkatan kontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut perekonomian nasional mengalami transformasi ekonomi.

Gambar 1.2

Persentase Output Nasional dalam 3 Sektor Periode Tahun 2000 – 2006



Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Pertumbuhan ekonomi akan terus menjadi tujuan utama pemerintah baik untuk tingkat nasional maupun untuk daerah atau provinsi. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara tentunya

¹ dikutip dari Setyobudi (2007)

² dikutip dari Jhingan (1990)

diupayakan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang mampu membuat beberapa hal atau komponen, yang diyakini dapat menjadi motor penggerak bagi peningkatan PDRB mencapai kondisi optimal ekonomi yang diinginkan dapat dicapai. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi seperti yang direncanakan atau diperkirakan, merupakan suatu ukuran keberhasilan kebijakan dalam perekonomian wilayah tersebut. Wilayah yang mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan bahwa wilayah tersebut relatif memiliki daya saing ekonomi. Oleh karena hal tersebut, maka pihak pemerintah pada masing-masing wilayah berusaha untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan cara melakukan berbagai kebijakan dalam perekonomian sebagai upaya meningkatkan daya saing ekonominya, diantaranya adalah melalui peningkatan sumber daya manusianya melalui peningkatan pendidikan, dan mengurangi beban pajak dengan harapan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi provinsi masing-masing. Pada saat yang sama, bersamaan dengan kebutuhan untuk bersaing secara global, para perusahaan mencari tempat berusaha untuk berinvestasi pada wilayah yang tersedianya tenaga kerja yang murah. Implikasi dari keadaan tersebut akan memberikan dampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi pada wilayahnya masing-masing.

Sumber daya manusia memainkan peranan penting sebagai salah unsur dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan produktivitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan suatu jaminan untuk tercapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Melalui pendidikan yang memadai akan tercipta tenaga kerja yang berkualitas yang tercermin dari produktivitas kerjanya sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan output perekonomian dari suatu negara. Daerah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi salah daya tarik untuk daerah tersebut menjadi daerah ramah investasi.

Pajak adalah merupakan sumber pendapatan pemerintah yang kemudian akan dibelanjakan untuk menyediakan barang dan jasa publik. Peningkatan penyediaan barang publik maka dengan sendirinya pemerintah akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendapatkan dan mengelola sumber pendapatan daerahnya masing-masing. Salah satu sumber pendapatannya adalah dari pajak daerah. Penerimaan pajak

daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), tapi pada sisi yang berbeda oleh para pengusaha dan investor menganggap besaran pajak menjadi satu faktor yang menentukan kesediaannya untuk melakukan investasi di daerah tersebut.

Suatu region akan mencapai pertumbuhan ekonominya yang tinggi jika wilayah tersebut menarik bagi investor untuk berinvestasi. Para wirausahawan mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada bidang tertentu, bila investasi yang ditanamkannya akan menghasilkan cukup keuntungan, setelah memperhitungkan biaya-biaya investasi mencakup biaya modal tetap (tanah, fasilitas pabrik, mesin, dan sebagainya), biaya tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain. Bagi perusahaan atau pengusaha, upah merupakan salah satu biaya faktor produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya produksi. Maka pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Tingkat upah suatu wilayah akan menjadi salah satu pertimbangan kesediaan bagi investor untuk berinvestasi pada daerah bersangkutan. Menurut Case & Fair (2004) upah tenaga kerja yang semakin tinggi memungkinkan untuk mengurangi laju pertumbuhan tenaga kerja atau dengan kata lain akan meningkatkan pengangguran. Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Wilayah atau daerah yang tingkat penganggurannya tinggi mengindikasikan daya saing ekonominya relatif rendah.

Dewasa ini istilah daya saing telah menjadi suatu konsep yang banyak dan secara luas digunakan dalam literature ekonomi dan pusat penelitian dan pembuatan kebijakan dari negara maju dan negara berkembang. Daya saing adalah suatu ciri-ciri multi dimensional dari suatu kesatuan ekonomi, seperti perusahaan, industri, daerah, atau negara, bergerak dalam suatu pasar ekonomi yang menggambarkan performa ekonominya melalui hubungan dengan kesatuan ekonomi lainnya. Menurut Bollman dan Bryden (1997)³ daya saing dapat dianggap sebagai "*key rationale for economic restructuring*", daya saing merupakan bagian pokok yang penting dari pertumbuhan, hal ini berasal dari pemikiran yang umum diterima bahwa suatu pertumbuhan ekonomi dan standar

³ dikutip dari Tiepoh dan Burns (2004)

kehidupan suatu negara secara langsung berhubungan dengan kemampuan industrinya untuk berkompetisi dalam ekonomi global.

Pembangunan ekonomi berbasis region merupakan suatu retorika baru yang banyak disoroti oleh para ahli ekonomi regional dewasa ini. Pembangunan ekonomi berbasis region mencakup pembangunan ekonomi dalam ruang lingkup region. Untuk mengukur pembangunan ekonomi suatu negara atau region, indikator yang sering dipakai adalah tingkat pertumbuhan ekonomi negara atau region tersebut. Tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya mengindikasikan aktivitas perekonomian suatu negara atau region tersebut meningkat. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut, meskipun tidak bisa dinafikan ukuran-ukuran yang lain.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu region ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, melihat struktur sektoral region tersebut. Kedua, melakukan analisis untuk mengidentifikasi sektor mana yang sedang mengalami pertumbuhan dan sektor mana yang mengalami penurunan. Ketiga, menilai performan region tersebut apakah secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi region tersebut mengalami peningkatan atau penurunan (*Sulistina, 2006*).

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, terdapat dikhotomi antara pembangunan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini dikarenakan dalam proses pembangunan Indonesia, Kawasan Timur Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di Kawasan Barat Indonesia. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka terhadap proses pembangunan di Kawasan Timur Indonesia terus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang berkemungkinan dan pembuat kebijakan pembangunan agar supaya pembangunan di wilayah tersebut dapat lebih cepat perkembangannya.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1. Dalam tabel tersebut dapat dilihat capaian pertumbuhan ekonomi yang merupakan gambaran awal dari daya saing ekonomi di delapan provinsi di Kawasan Timur Indonesia pada periode tahun 2000-2006. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh setiap provinsi sepanjang

periode tahun 2000-2006 sangat bervariasi. Dibandingkan dengan provinsi lainnya, Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi rata-ratanya lebih besar daripada yang dicapai nasional. Pada provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pertumbuhan ekonomi rata-ratanya lebih rendah dari nasional. Provinsi Maluku dalam kurun waktu penelitian menunjukkan hasil capaian pertumbuhan ekonominya rendah yaitu sebesar 3,70 persen. Sedangkan provinsi Papua mengalami pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi sangat tajam dan perekonomiannya mengalami kemunduran.

Tabel 1.1
 Persentase Pertumbuhan PDRB Provinsi KTI Periode Tahun 2000-2006

Periode	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	Rata-Rata
Sulut	3.45	3.32	3.20	4.26	4.90	6.16	4.21
Sulteng	5.10	5.62	6.21	7.15	7.57	7.80	6.57
Sulsel	5.07	4.09	5.25	5.31	-2.33	6.72	4.02
Sultra	5.01	6.66	7.57	7.51	7.31	7.68	6.96
NTB	7.42	3.51	3.90	6.25	1.82	1.98	4.15
NTT	4.73	4.88	4.57	4.77	3.42	5.08	4.57
Maluku	-0.03	2.87	4.31	4.43	5.07	5.55	3.70
Papua	8.24	-12.60	-0.28	-22.53	36.40	-17.20	-1.33
Nasional	3.64	4.50	4.78	5.03	5.69	5.51	4.86

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh beberapa provinsi terjadi peningkatan, hal ini sejalan dengan apa yang diharapkan dengan diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2001. Dapat dilihat provinsi-provinsi yang meningkat pertumbuhan ekonominya adalah provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Selanjutnya dapat juga dilihat pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tahun 2005 sebesar sekitar 120 persen terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Secara keseluruhan hanya jelas terlihat pada provinsi Papua yang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonominya, sedangkan provinsi lainnya justru terjadi kenaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perkembangan pertumbuhan perekonomian dan transformasi struktur ekonomi masing-masing provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memberikan gambaran tentang daya saing ekonomi menarik untuk dikaji.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Adanya perbedaan performa ekonomi dari masing-masing provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) menimbulkan pertanyaan sebagai berikut :

- a. Sektor-sektor ekonomi manakah yang berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi di Kawasan Timur Indonesia Indonesia (KTI)?
- b. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah, pendidikan tenaga kerja serta upah terhadap daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia (KTI)?

1.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah mengenai bagaimana pengaruh pajak daerah, pendidikan tenaga kerja serta upah terhadap daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia (KTI), maka hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diduga pajak daerah memiliki efek negatif dalam daya saing ekonomi.
- b. Diduga upah minimum provinsi memiliki dampak yang negatif terhadap daya saing ekonomi.
- c. Diduga faktor pendidikan tenaga kerja memiliki dampak yang positif terhadap daya saing ekonomi.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
- b. Mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang menjadi penentu daya saing Kawasan Timur Indonesia (KTI).

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan diketahuinya sektor-sektor ekonomi yang berpotensi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia dan mengetahui pengaruh dari pajak daerah, pendidikan tenaga kerja, dan upah terhadap daya saing ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dibidang pembangunan dan perencanaan regional dan menjadi bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini sebagai berikut :

Bab 1, Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab 2, Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan sejumlah teori yang menyangkut, pengertian daya saing ekonomi, ide dasar analisa *shift-share*, hubungan pendidikan dengan pertumbuhan, hubungan pajak dengan pertumbuhan, dan upah, disertai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan.

Bab 3, Metodologi Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang, spesifikasi model yang terdiri dari spesifikasi model dekomposisi pertumbuhan ekonomi regional dan spesifikasi model daya saing ekonomi regional, serta teknik estimasi ekonometrika beserta pengujian yang terkait. Pada bab ini juga diuraikan tentang jenis dan sumber data, definisi operasional penelitian, dan kerangka pikir analisis.

Bab 4, Gambaran Umum Wilayah Kawasan Timur Indonesia

Pada bab ini menguraikan gambaran umum aspek ekonomi yang melatarbelakangi performa perekonomian di Kawasan Timur Indonesia.

Bab 5, Analisis

Pada bab ini menguraikan analisis kalkulasi *shift-share* dinamis dan hasil estimasi metode *pooled least squares*, disertai dengan analisis ekonominya.

Bab 6, Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tinjauan pustaka mengenai konsep dan definisi daya saing ekonomi, dan ide dasar dari analisis *shift-share*, *shift-share* dinamis merupakan pengembangan dari *shift-share* tradisional sebagai perangkat analisis untuk mengetahui posisi daya saing ekonomi regional suatu wilayah atau daerah. Selain daya saing ekonomi akan dibahas juga hubungan antara pendidikan, pajak dan upah dengan pertumbuhan ekonomi.

2.1. Daya Saing Ekonomi

Dalam kurun waktu belakangan ini, istilah daya saing telah menjadi suatu konsep yang banyak dan secara luas digunakan dalam literature ilmu ekonomi dan pusat penelitian dan pembuatan kebijakan dari Negara maju dan Negara berkembang. Menurut Reiljan dkk (2000)⁴ daya saing merefleksikan suatu posisi dalam satu kesatuan ekonomi (negara, industri, perusahaan, rumah tangga) dalam kaitannya dengan satu kesatuan ekonomi lainnya dengan membandingkan kualitas atau hasil dari aktivitas berupa superioritas atau inferioritas.

Menurut Porter (1990)⁵ untuk memahami daya saing suatu negara atau region, titik awalnya harus berupa sebab utama dari kekayaannya, yang mana ditemukan dalam produktivitas ekonominya, sebagai ukuran dari nilai barang dan jasa yang diproduksi manusia per unit, modal, dan sumberdaya alam. Tantangan utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana menciptakan kondisi untuk pertumbuhan produktivitas yang tinggi dan berkesinambungan.

Berkaitan dengan konsep daya saing *The World Economic Forum* (WEF) dan *The World International Institute for Management Development* (IMD), telah mempublikasi laporan indeks daya saing tahunan dengan konsep defenisinya sebagai berikut. The WEF mendefinisikan daya saing sebagai "kemampuan dari suatu negara untuk meraih laju pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan dalam *gross domestic product* (GDP) per kapita", dan The IMD mendefinisikannya sebagai "kemampuan suatu negara untuk membuat nilai tambah dan kemudian meningkatkan kesejahteraan nasional dengan mengatur assets dan proses, daya tarik, dan agresifitas, *globality*, dan *proximity*, dan dengan mengintegrasikan

⁴ dikutip dari Tiepoh dan Burns (2004)

⁵ ibid

hubungannya ke dalam suatu model ekonomi dan sosial" (Tiepoth dan Burns, 2004).

2.2. Analisis Shift-Share

Untuk menentukan posisi daya saing ekonomi dari masing-masing region, dapat digunakan *shift-share analysis* sebagai perangkat analisis (Tiepoth dan Burns, 2004). Analisis *shift-share* secara luas digunakan dalam analisis ekonomi regional untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) di suatu region. Analisa *shift-share* merupakan perangkat analisis deskriptif yang secara sistematis menggambarkan perbedaan tingkat pertumbuhan berdasarkan sektor dan region antara dua titik waktu. Model ini mendisagregasi pertumbuhan sektor-sektor di dalam perekonomian suatu region guna mengidentifikasi komponen-komponen dari perubahan tersebut dan menghitung efek-efek dari struktur ekonomi regional pada pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan.

Menurut Berzeg (1978) dari sisi teori, analisis *shift-share* merupakan perpaduan dua intuisi yang secara sistimatik menerangkan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor dan region. Pertama, berhubungan dengan teori ekonomi pembangunan khususnya dalam *stage theory* yang menggambarkan adanya hubungan antara tingkat pembangunan perekonomian dan komposisi sektoral dari nilai output bruto suatu negara. Tingkat pembangunan suatu negara akan melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dengan dominasi sektor pertanian yang merupakan ciri-ciri dari negara berkembang atau kurang maju (*underdeveloped economies*). Kondisi perekonomian yang semakin baik (maju) ditunjukkan dengan pembangunan yang ditekankan pada industrialisasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan hal ini terjadi pada negara-negara maju (*developed economies*). Bila ekonomi suatu negara sangat maju terutama karena penguasaan teknologi yang tinggi maka perekonomiannya sudah tidak lagi bersandar pada sektor industri yang menekankan pada produksi massal, tetapi sudah beralih kepada sektor-sektor jasa yang memberikan nilai tambah yang sangat besar. Kedua, analisa *shift-share* didasarkan pada perbedaan struktur perekonomian antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ketimpangan struktur ekonomi regional sering dijelaskan karena perbedaan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, distribusi lokasi dari kegiatan ekonomi yang berkaitan erat dengan biaya transportasi untuk memindahkan

sumber daya alam, faktor-faktor produksi yang berupa bahan baku, input antara (*intermediate good*) serta barang jadi (*final good*), juga menjadi penyebab perbedaan struktur ekonomi antar region. Disamping faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, faktor institusi seperti pajak juga merupakan penyebab adanya perbedaan struktur ekonomi suatu region.

2.2.1. Analisis Shift-Share Tradisional

Ide dasar dari model analisis *shift-share* tradisional adalah mendekomposisi pertumbuhan ekonomi suatu sektor dalam region menjadi tiga komponen yaitu efek nasional (*national effect*), efek struktural (*structural effect*) dan efek daya saing regional (*regional competition effect*) (Curtis, 1972 dan Richardson, 1978). Selanjutnya menurut Richardson (1978)⁶ pada dasarnya, ada dua pendekatan yang dapat dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

$$a. \quad G = NS + IM + RS, \text{ atau} \quad (2.1)$$

$$G = RP + RS \quad (2.2)$$

dimana,

$$G = \text{Regional Economic Growth} = (E_{(t+1)}^{ni} / E_{(t)}^{ni}), \quad (2.3)$$

untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah bruto daerah dari tahun ke tahun

$$NS = \text{National Share} = (E_{(t+1)}^n / E_{(t)}^n), \quad (2.4)$$

untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah bruto nasional dari tahun ke tahun

$$IM = \text{Industrial Mix} = \{ (E_{(t+1)}^{ni} / E_{(t)}^{ni}) - (E_{(t+1)}^n / E_{(t)}^n) \}, \quad (2.5)$$

untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah bruto nasional sektor i dibandingkan total sektornya

$$RS = \text{Regional Shift} = \{ (E_{(t+1)}^{ni} / E_{(t)}^{ni}) - (E_{(t+1)}^{ni} / E_{(t)}^{ni}) \}, \quad (2.6)$$

untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah bruto daerah sektor i dibandingkan pertumbuhan nilai tambah bruto nasional sektor i

⁶ dikutip dari Achjar (2006)

$$RP = \text{Regional Proportion} = NS + IM \quad (2.7)$$

b. $G = R + S$, atau (2.8)

$$G = R + Sp + Sd \quad (2.9)$$

dimana,

G = Regional Economic Growth

R = Regional Share

S = Regional Shift , yang terdiri dari

Sp = Proportional Shift dan Sd = Differential Shift

Pendekatan (a) dan (b) tersebut menghasilkan nilai yang sama karena Sp sama dengan IM dan $Sd = RS$. Rumus yang digunakan antara kedua pendekatan itu juga hasilnya akan sama.

Analisa ini disebut analisa *shift-share* karena ketiga komponen tersebut dapat dikelompokkan menjadi komponen *shift* dan komponen *share*. Yang dimaksud dengan komponen *shift* adalah efek struktural (*structural effect*) dan efek daya saing (*competition effect*), yang menggambarkan pertumbuhan dan penurunan perekonomian suatu region. Sedangkan yang disebut komponen *share* adalah efek nasional (*national effect*), yang menggambarkan andil pertumbuhan ekonomi secara nasional terhadap pertumbuhan sektor suatu region.

Dari sisi region ketiga komponen tersebut dapat dibagi menjadi efek eksogen dan efek endogen dalam perekonomian suatu region. Efek nasional (*national effect*) dan efek struktural (*structural effect*) merupakan efek eksogen bagi perekonomian suatu region karena merupakan efek atau pengaruh yang berasal dari luar region yang mempengaruhi region tersebut. Sementara efek endogen bagi perekonomian suatu region adalah efek daya saing regional (*regional competition effect*) yaitu efek atau pengaruh yang berasal dari kondisi ekonomi region itu sendiri.

Menurut Glasson (1977)⁷ kedua komponen *shift* yaitu efek struktural (*structural/industrial mix shift*) dan efek daya saing (*regional competition shift*) memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal dimana efek struktural merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal

⁷ dikutip dari Kusumastuti (2007)

yang bekerja secara nasional, sedangkan efek daya saing (*regional competition shift*) adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan. Apabila nilai efek struktural dan efek daya saing positif maka sektor yang bersangkutan dalam perekonomian daerah menempati posisi yang baik untuk daerah yang bersangkutan. Selanjutnya sektor-sektor yang memiliki efek daya saing (*competition shift/effect*) positif memiliki keunggulan komparatif terhadap sektor yang sama di daerah lain. Selain itu, sektor-sektor yang memiliki efek daya saing (*competition shift/effect*) positif berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi di daerah dan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Apabila efek daya saing negatif maka tingkat pertumbuhan sektor tersebut relatif lamban. Sektor yang memiliki potensi yang menjadi motor penggerak perekonomian disuatu region adalah sektor yang memiliki nilai efek struktural (*structural effect*) dan nilai efek daya saing (*regional competition effect*) yang positif, dan nilai efek daya saingnya lebih besar dari nilai efek strukturalnya.

2.2.2. Analisis Shift-Share Dinamis

Model analisis *shift-share* sebagai perangkat analisis untuk menentukan komponen-komponen penting yang dapat memberikan informasi tentang penyebab terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar region mengalami perkembangan, yaitu dari model analisis *shift-share* tradisional berkembang menjadi model analisis *shift-share* dinamis. Model analisis *shift-share* memiliki kelemahan yaitu hasil dari analisisnya dapat menyimpang (bias) jika struktur industri berubah secara mencolok atau drastis selama periode penelitian, karena pada model tradisional hanya menghitung perubahan antara awal periode dan akhir periode yang hanya menggunakan data pada dua titik waktu. Dengan adanya kelemahan tersebut dikembangkan suatu model analisis *shift-share* yang dikenal dengan analisa *shift-share* dinamis. Dalam model ini periode waktu sampel dibagi menjadi beberapa sub periode yang lebih pendek (misalnya satu tahun), menghitung pengaruh dari setiap indeks untuk setiap sub periode, dan kemudian menjumlahkan pengaruh dari sub-sub periode. Dengan demikian analisa *shift-share* dinamis dapat membuat analisa tersebut lebih tepat.

Model analisis *shift-share* dinamis ditujukan sebagai penyelesaian masalah-masalah yang timbul karena perubahan pada *industrial mix* dan *regional shift*. Metode ini merupakan pengembangan dari Thirwall (1967) yang

menyarankan bahwa periode penelitian dipecah dalam beberapa sub periode untuk mengurangi besarnya atau kuatnya perubahan pada *industrial mix shift* dalam hasil analisisnya. Menurut Barff dan Knight (1988) pendekatan dinamis mempunyai keuntungan dalam menyelesaikan masalah perubahan *industrial mix* tahunan, perbaharuan tenaga kerja secara kontinyu, dan penggunaan tingkat pertumbuhan tahunan. Pendekatan dinamis memberikan alokasi perubahan tenaga kerja regional yang lebih akurat diantara beberapa pengaruh dan memperhitungkan identifikasi transisi atau peralihan ekonomi dari tahun ke tahun yang tidak biasa atau janggal. Untuk memperoleh model dinamis, semua komponen dalam model *shift-share* dapat dihitung untuk semua tahun yang berdekatan (berdampingan), kemudian bisa ditampilkan rata-rata perubahan tahunan atau jumlah perubahan tahunan untuk mendapatkan *total national share*, *sektoral share*, dan *regional share* pada periode waktu sampel, dengan persamaan :

$$\sum_k TS_{ik}^r = \sum_k NS_{ik}^r + \sum_k SS_{ik}^r + \sum_k RS_{ik}^r$$

dimana,

TS_i^r adalah perubahan dalam sektor ke-i region ke-r

NS_i^r adalah komponen *national share*

SS_i^r adalah komponen *proportional shift (industry mix effect)*

RS_i^r adalah komponen *differential shift (competitive/regional effect)*

$k = 1, 2, \dots, T$ menunjukkan waktu.

Penjumlahan ketiga komponen tersebut bisa dilakukan untuk sembarang panjang waktu periode.

Penggunaan pendekatan analisa *shift-share* telah banyak dilakukan dalam penelitian pada berbagai macam disiplin ilmu. Berikut ini dapat dilihat beberapa hasil penelitian yang menggunakan pendekatan analisa *shift-share* khususnya penelitian yang berkaitan dengan daya saing ekonomi regional.

Seyfried (1996), menggunakan model analisis *shift-share* dinamis dan cross section model untuk mengetahui daya saing ekonomi dari tiap-tiap negara bagian Amerika Serikat bagian selatan melalui pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing ekonomi dari masing-masing negara bagian. Studi ini menggunakan data *Gross State Product* dengan periode waktu tahun 1982-1989.

Posisi daya saing ekonomi (*competition effect*) dari masing-masing negara bagian yang diperoleh dengan menggunakan *shift-share* dipisahkan/diisolasikan dari pengaruh trend nasional (*national effect*) dan efek struktural (*structural effect*). Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing ekonomi oleh peneliti ditentukan ada tiga yaitu pajak perorangan, upah rata-rata tahunan dan pendidikan tenaga kerja lulusan *college*. Dalam model ini, posisi efek daya saing masing-masing negara bagian dijadikan sebagai variabel dependennya dan yang menjadi variabel independennya yaitu pajak, upah dan pendidikan, kemudian diestimasi menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Dari hasil penghitungan *shift-share* menunjukkan terdapat tujuh negara bagian yang memiliki efek struktural positif, yang terbesar adalah Maryland diikuti Florida, Missouri, Tennessee, Georgia, dan yang paling rendah adalah Virginia, dan setengah dari seluruh negara bagian memiliki efek daya saing regional yang positif yang mengindikasikan kinerja ekonomi yang superior dan lima diantaranya mencapai lebih dari 12 %, dan negara bagian Louisiana dan Oklahoma mengalami efek negatif lebih dari 30 %. Selanjutnya dari hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien tingkat pendidikan positif sedangkan upah negatif dan keduanya signifikan pada level 1 persen. Walaupun koefisien pajak negatif, tetapi tidak signifikan secara statistik.

Tiepoh dan Burns (2004) dengan menggunakan pendekatan analisis *shift-share* dinamis melakukan penelitian di Canada mengenai daya saing antar negara bagian dan juga antara daerah wilayah perkotaan dengan pedesaan pada sektor kehutanan, pertanian, sarana dan prasarana, dan manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara bagian Ontario mengalami pertumbuhan output tertinggi dan yang terendah dialami oleh Saskatchewan. Ditemukan juga bahwa daerah urban core mencapai pertumbuhan output terbesar sedangkan daerah luar pedesaan mengalami pertumbuhan terkecil dan terjadi dampak negatif untuk efek industri dan efek daya saing.

Zikri (2005), melakukan kajian tentang daya saing Indonesia diantara negara-negara ASEAN dan dengan Republik Rakyat Cina dalam melakukan ekspor produk manufaktur ke pasar Amerika Serikat pada periode waktu tahun 1994-2001 dengan menggunakan metode *shift-share*. Dari hasil perhitungannya diketahui bahwa secara umum Indonesia memiliki kinerja ekspor yang relatif baik, dimana dari sembilan kelompok manufaktur terdapat tujuh yang positif dan lima diantaranya adalah yang terbaik diantara negara ASEAN, keunggulan yang terbesar yaitu produk tekstil dan produk kimia. Kehadiran RRC sebagai

persaingan menjadikan negara-negara ASEAN mengalami penurunan daya saing, akan tetapi khusus untuk Indonesia masih mampu unggul untuk kelompok komoditi kategori ISIC 32, 33, dan 35. Selanjutnya agar supaya Indonesia mampu mempertahankan daya saing dengan RRC, maka karakter ekspor harus bertumpu pada komoditas yang relatif padat karya serta berbasis hasil sumber daya alam (SDA). Untuk meningkatkan efek struktur industri maka komoditas produk logam perlu dikurangi namun pada kelompok komoditas produk kimia harus ditingkatkan dan untuk meningkatkan efek daya saing dan efek lokasi, kelompok komoditi yang perlu dipacu pertumbuhan ekspornya yaitu produk tekstil dan produk kayu.

Sulistina (2006), dengan menggunakan model *shift-share* tradisional dan model *shift-share* stokastik melakukan analisis pertumbuhan ekonomi per sektor dari 27 provinsi di Indonesia dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode tahun 1993 – 2003. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum hasil perhitungan dengan dua model tersebut menghasilkan kesimpulan relatif sama. Pola umum efek nasional (*national effect*) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk semua sektor ekonomi kecuali pada masa krisis tahun 1998 berpengaruh negatif. Secara nasional dari sembilan sektor ekonomi hanya lima sektor yang mempunyai rata-rata efek struktural yang positif, nilai efek struktural (*structural effect*) yang tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor bangunan. Dari efek daya saing (*competition effect*) provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki nilai tertinggi, dan yang terendah adalah provinsi Maluku. Kemudian pada waktu krisis ekonomi tahun 1998 Kawasan Timur Indonesia mengalami penurunan nilai yang sangat tajam dan di wilayah Kalimantan relatif stabil. Sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk menjadi motor penggerak disebagian besar provinsi-provinsi adalah sektor industri pengolahan, dan untuk wilayah Kalimantan adalah sektor jasa-jasa dan untuk wilayah Indonesia Timur adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kusumastuti (2007), melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat komponen daya saing dan struktur ekspor produk industri manufaktur yang mempengaruhi pertumbuhan perdagangan khususnya ekspor serta perubahannya di setiap propinsi Indonesia pada periode antara tahun 1999-2005. Dengan mengembangkan teori perdagangan dalam kerangka regional digunakan model analisa *shift-share* dinamis yang mendekomposisi perubahan atau pertumbuhan perdagangan ke dalam 8 komponen yang berkaitan dengan ekspor,

impor, dan permintaan domestik. Model dinamis dipakai agar dapat melihat perubahan dari tiap komponen *shift-share*.

Dari hasil dekomposisi pertumbuhan perdagangan di setiap propinsi ditemukan bahwa komponen efek nasional baik ekspor, impor maupun permintaan domestik memberikan pengaruh yang sama di setiap propinsi. Propinsi-propinsi yang memiliki struktur industri yang kuat pada komoditi makanan dan minuman serta tekstil dan produk tekstil akan mengalami perubahan pada efek struktur ekspornya dari tahun 2000 ke tahun 2005. Sementara yang menspesialisasikan pada komoditi kayu dan barang dari kayu tidak mengalami perubahan pada efek struktur ekspornya (tetap negatif) dalam kurun waktu 2000-2005.

Daya saing propinsi-propinsi pada produk makanan dan minuman serta kayu dan barang dari kayu akan relatif lebih tinggi dibandingkan propinsi lainnya dikarenakan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT) posisi daya saing akan lebih tinggi karena memiliki ketrampilan dan teknologi yang lebih maju dibandingkan propinsi lainnya.

Studi tentang daya saing khususnya daya saing investasi daerah telah dilakukan oleh berbagai pihak yang tertarik dan berkepentingan. Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bersama *United State Agency of Improvement dan Development (USAID)* serta *Asian Foundation* telah melakukan studi tentang daya saing investasi daerah di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Studi ini untuk meneliti peringkat daya saing masing-masing daerah yang didasarkan pada 5 kategori pendukung, yaitu institusi (kelembagaan), ekonomi daerah, sosial budaya politik keamanan (sosbudpolkam), Infrastruktur fisik, dan tenaga kerja.

Menurut Brodjonegoro (2006), berkaitan dengan diberlakukannya otonomi daerah mempengaruhi kemampuan daya saing daerah untuk menjadikan daerahnya masing-masing menarik untuk para investor untuk berinvestasi. Daya saing investasi daerah ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, ketenagakerjaan, dan infrastuktur fisik. Secara umum peringkat daerah dalam daya saing investasi daerah menunjukkan bahwa daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) merupakan daerah dengan posisi sebagai daerah ramah investasi. Dilihat dari iklim investasi secara umum dan peringkat kategori, kabupaten dan kota di luar Jawa lebih unggul dibandingkan dengan di Jawa.

2.2. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber daya manusia memainkan peranan penting sebagai salah unsur dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan produktivitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Melalui pendidikan yang memadai akan tercipta tenaga kerja yang berkualitas yang tercermin dari produktivitas kerjanya sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan output perekonomian dari suatu negara. Studi tentang hubungan antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan.

Denison (1962) dan Schults (1961)⁸ telah merintis pengukuran kontribusi investasi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Denison menggunakan pendekatan perhitungan pertumbuhan (*growth accounting approach*) dan Schults menggunakan pendekatan yang disebut dengan *model rate of return of human capital*. Perhitungan pertumbuhan ini didasarkan pada konsep fungsi produksi, yang menghubungkan output ekonomis (Y) terhadap factor input, yaitu kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan memisahkan pengaruh masing-masing dari input tersebut menghasilkan kovarians residu yang sangat besar, kovarians residu ini diterapkan dalam menjelaskan efek pendidikan atau keahlian dan ketrampilan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oleh Denison dengan model ini ditemukan 23 persen pertumbuhan output di Amerika Serikat pada kurun waktu 1929-1957 dapat dijelaskan oleh adanya peningkatan pendidikan tenaga kerja. Hasil yang ditemukan oleh Schults dengan membandingkan antara tingkat balik terhadap modal manusia dengan tingkat balik terhadap modal fisik menunjukkan bahwa proporsi yang cukup tinggi dari tingkat pertumbuhan output di Amerika Serikat yang disebabkan oleh pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi pengembangan sumber daya manusia.

2.3. Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pajak adalah merupakan sumber pendapatan pemerintah yang kemudian akan dibelanjakan untuk menyediakan barang dan jasa publik. Pemerintah menyediakan barang dan jasa dengan menggunakan tenaga kerja, bangunan, peralatan, dan tanah. Biaya riil dari barang dan jasa pemerintah merupakan nilai barang dan jasa perorangan yang harus dikorbankan ketika sumber daya dipindahkan untuk digunakan oleh pemerintah. Ketika penduduk membayar pajak,

⁸ dikutip dari Subroto (1997)

maka kapasitas mereka untuk membeli barang dan jasa bagi mereka menjadi berkurang. Sumber daya dialihkan dari penggunaan perorangan dan dibelanjakan atau ditentukan oleh pemerintah. Pajak mempengaruhi barang dan jasa dan merupakan insentif untuk bekerja, menabung dan mengalokasikan pengeluaran diantara barang dan jasa. Pajak mengganggu jalannya perekonomian karena menyebabkan individu membuat pilihan tidak hanya berdasarkan keuntungan dan biaya dari tindakan mereka, namun juga berdasarkan keuntungan atau kerugian pajak terhadap keputusan mereka. Peningkatan penyediaan barang publik maka dengan sendirinya pemerintah akan meningkatkan penerimaan pajak. Kenaikan pemungutan pajak ini akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, sehingga menyebabkan harga produk yang dihasilkan akan meningkat dan jumlah yang diminta konsumen di pasar menurun.

Menurut Sukimo (2004) secara teoritis pemotongan pajak akan menambah pendapatan disposable rumah tangga, hal ini akan memberikan dampak perekonomian yaitu akan menggeser kurva IS ke kanan yang mengakibatkan kenaikan agregat demand. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan output yang merupakan terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif. Menurut Dornbusch dkk (2001), pemotongan pajak akan mempengaruhi baik penawaran agregat maupun permintaan agregat. Permintaan agregat meningkat dan kurva penawaran agregat bergeser ke kanan, karena pajak yang rendah meningkatkan insentif untuk bekerja. Dalam jangka pendek, terjadi peningkatan perekonomian. Selanjutnya menurut Mankiw (2000), pajak akan mempengaruhi insentif perusahaan untuk mengakumulasi modal atau insentif investasi. Berbagai bentuk pemungutan pajak terhadap perusahaan akan menghambat investasi.

Penelitian tentang pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Dalam penelitian dari Helms (1985) dengan menggunakan data panel menemukan bahwa kenaikan pada pajak daerah akan memberikan dampak memperlambat pertumbuhan ekonomi ketika penerimaan digunakan untuk membiayai transfer. Akan tetapi, kalau penerimaan digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan pengembangan jasa-jasa publik, pajak daerah akan mempunyai pengaruh yang menguntungkan terhadap perekonomian regional. Selanjutnya hasil yang diperoleh Kim (1997)⁹ pada penelitiannya di Korea menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Korea.

⁹ dikutip dari Mulyadi (2005)

Di Indonesia, penerimaan pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai wewenang untuk meningkatkan PAD masing-masing provinsi. Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 yang termasuk jenis-jenis pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Besaran pajak tersebut di setiap provinsi sangat bervariasi dan sangat bergantung dari kebijakan pemerintah provinsi masing-masing.

2.4. Upah dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak membedakan antara pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Di dalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada para pekerja) tersebut dinamakan upah.

Menurut para ahli ekonomi, ada perbedaan diantara dua pengertian upah, yaitu upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga kerja non produksi. Sedangkan upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja.

Dewasa ini Upah Minimum Provinsi (UMP) atau dahulunya disebut Upah Minimum Regional (UMR) adalah tingkat upah tenaga kerja yang penentuan besarnya ditentukan pemerintah dengan penetapan Gubernur masing-masing di tiap daerah. Berlakunya UMP menjadikan upah itu menjadi kaku atau sticky wages, sehingga upah itu sendiri tidak dapat turun atau diturunkan meskipun ketika permintaan tenaga kerja menurun. Dalam teori ekonomi, upah tenaga kerja yang semakin tinggi memungkinkan untuk mengurangi laju pertumbuhan tenaga kerja atau dengan kata lain akan meningkatkan pengangguran, Case & Fair, (2004). Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Wilayah atau daerah yang

tingkat penganggurannya tinggi mengindikasikan daya saing ekonominya relatif rendah.

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor upah tenaga menjadi salah satu penentu untuk suatu region akan dimasuki oleh para investor untuk berinvestasi. Hasil penelitian Kunio Igusa (1991)¹⁰ menunjukkan bahwa bagi perusahaan atau pengusaha, upah merupakan salah satu biaya faktor produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya produksi. Maka pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Selanjutnya menurut Sintawaty (2004) dari hasil penelitian tentang Disparitas Alokasi Investasi Regional di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Periode 1995-1999 menunjukkan bahwa variabel upah mempengaruhi investasi regional secara negatif, artinya upah yang tinggi suatu propinsi akan menyebabkan investor tidak mau menanamkan modal di propinsi tersebut.

¹⁰ dikutip dari Sintawaty (2004)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Spesifikasi Model

Dalam penelitian ini akan digunakan dua macam model yaitu model dekomposisi pertumbuhan ekonomi regional dan model daya saing ekonomi regional. Model dekomposisi pertumbuhan ekonomi regional bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi sebagai sektor penggerak perekonomian daerah, dan model daya saing ekonomi regional bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pajak daerah, pendidikan tenaga kerja, dan upah minimum provinsi terhadap daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia.

3.1.1. Spesifikasi Model Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi Regional

Analisis *shift-share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan sektor-sektor perekonomian disuatu daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional.

Sebagai perangkat analisis, metode *shift-share* digunakan untuk menentukan komponen-komponen penting yang dapat menunjukkan penyebab terjadinya perbedaan performa ekonomi antar region dan yang menentukan posisi daya saing masing-masing region (provinsi). Analisis *shift-share* mendekomposisi pertumbuhan ekonomi region menjadi tiga komponen yaitu efek nasional (*national effect*), efek struktural (*structural effect* atau *industry mix effect*), dan efek daya saing regional (*regional competition effect*), dan jumlah ketiga komponen tersebut adalah efek total (*total effect*) yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu region,

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis *shift-share* dinamis. Model analisis *shift-share* dinamis merupakan pengembangan model *shift-share* tradisional. Metode tradisional memiliki kelemahan yaitu hasil dari analisisnya akan menyimpang (bias) jika struktur industri berubah secara mencolok atau drastis selama periode penelitian, karena model tradisional hanya menghitung perubahan antara awal periode dan akhir periode yang hanya

menggunakan data pada dua titik waktu. Analisa *shift-share* dinamis membagi periode waktu sampel kedalam sub periode yang lebih pendek (satu tahun), menghitung pengaruh dari setiap indeks untuk setiap sub periode, dan kemudian menjumlahkan pengaruh dari sub-sub periode. Dengan demikian analisa *shift-share* dinamis dapat membuat analisa tersebut lebih tepat.

Model analisis *shift-share* yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa komposisi pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah model analisis *shift-share* dinamis, dengan mengikuti model yang digunakan pada penelitian dari Barff dan Knight (1988), serta Tiepoh dan Burns (2004). Formulasi dari model ini diperlihatkan sebagai berikut.

The National Growth Effect = N

$$N = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (G_j \cdot R_i)$$

(3.1)

The Industrial Structure or Mix Effect = I

$$I = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n [R_i (G_j - G)]$$

(3.2)

The Regional Competition Effect = COM

$$COM = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n [R_i (g_i - G_j)]$$

(3.3)

Total Effect = T = N + I + COM

(3.4)

dimana,

T = *Total Effect* atau efek total

Efek total adalah Keseluruhan Pertumbuhan PDRB masing-masing provinsi periode 2000 – 2006.

- N = *the national growth effect* atau efek nasional
Efek nasional dapat diinterpretasikan sebagai pertumbuhan pendapatan yang standar pada seluruh sektor di seluruh region dengan kata lain efek nasional (*national effect*) menggambarkan pertumbuhan setiap sektor di suatu region yang dihasilkan jika tingkat pertumbuhannya sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Efek nasional akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi region (meningkatkan pertumbuhan ekonomi region) jika nilai efek ini positif, sebaliknya akan memberikan kontribusi negatif atau menurunkan pertumbuhan ekonomi region jika nilai efek ini negatif. Pengaruh efek ini sama untuk seluruh sektor di setiap propinsi.
- I = *the industrial or mix effect* atau efek struktural
Efek struktural adalah efek yang menjelaskan akan dampak dari komposisi perindustrian pada suatu region atau provinsi. Suatu provinsi dengan konsentrasi tinggi dari pertumbuhan industri yang tinggi akan memiliki efek perindustrian yang positif, tetapi suatu provinsi yang memiliki konsentrasi tinggi dari pertumbuhan industri yang rendah akan memiliki efek perindustrian yang negatif.
- COM = *the regional competition effect* atau efek daya saing regional
Efek daya saing regional adalah mengukur perbedaan antara laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi region/provinsi dengan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Efek daya saing regional menggambarkan daya saing dan tingkat kompetitif sektor di tingkat region/provinsi. Jika nilai efek daya saing positif berarti sektor-sektor ekonomi ditingkat provinsi lebih kompetitif dibandingkan sektor-sektor ekonomi tersebut di tingkat nasional, sebaliknya jika nilai efek ini negatif berarti sektor ekonomi ditingkat provinsi kurang kompetitif dibandingkan sektor-sektor ekonomi tersebut di tingkat nasional. Suatu region/provinsi dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat.
- Ri = porsi dari PRDB per sektor per tahun awal tiap provinsi
- G = laju pertumbuhan PDB nasional per periode tahun sampel

- G_i = tingkat pertumbuhan PDB nasional per sektor per periode tahun sampel
 g_i = tingkat pertumbuhan PRDB per sektor tiap provinsi per periode tahun sampel
 i = 1, 2, 3, ..., n (sembilan sektor ekonomi)
 j = 2000, 2001, ..., m (tahun 2000 – 2006)

Dari hasil perhitungan metode *shift-share* dinamis tersebut di atas selanjutnya dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki potensi yang menjadi motor penggerak perekonomian disuatu region. Sektor-sektor tersebut adalah sektor yang memiliki nilai efek struktural (*structural effect*) dan nilai efek daya saing (*regional competition effect*) yang positif, dan nilai efek daya saingnya (*regional competition effect*) lebih besar dari nilai efek strukturalnya (*structural effect*). Sektor-sektor ini merupakan sektor yang berpotensi tumbuh dengan pesat, mempunyai prospek yang baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi bersangkutan, dan dapat dijadikan target pembangunan provinsi tersebut.

3.1.2. Spesifikasi dan Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional

Dengan Model analisis *shift-share* dinamis diperoleh komponen-komponen penting yang dapat menerangkan penyebab terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar region dan yang menentukan posisi daya saing masing-masing region (provinsi), yaitu efek nasional (*national effect*), efek struktural (*structural effect*), dan efek daya saing regional (*regional competition effect*), dan penjumlahan ketiga komponen tersebut adalah efek total (*total effect*). Dalam penelitian ini model yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pajak daerah, pendidikan tenaga kerja, dan upah terhadap kemampuan daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia adalah mengikuti model daya saing ekonomi regional yang digunakan oleh Seyfried (1996) dengan beberapa modifikasi.

Model daya saing regional yang digunakan oleh Seyfried untuk mengkaji daya saing ekonomi regional negara-negara bagian yang berada dibagian selatan Amerika Serikat pada periode tahun 1983-1989 ditunjukkan pada persamaan (3.5).

$$\text{COM} = f(\text{WAGE}, \text{TAX}, \text{COL}) \quad (3.5)$$

dimana,

- COM = daya saing ekonomi regional
- WAGE = rata-rata upah tahunan masing-masing negara bagian Amerika Serikat bagian selatan
- TAX = pajak penghasilan per kapita masing-masing negara bagian Amerika Serikat bagian selatan
- COL = persentase tenaga kerja lulusan akademi dan perguruan tinggi masing-masing negara bagian Amerika Serikat bagian selatan

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari *WAGE*, *TAX*, dan *COL* terhadap daya saing ekonomi regional pada negara bagian Amerika Serikat di wilayah Selatan, dengan menggunakan metode *ordinary least squares* (OLS) data *cross section* dari enam belas negara bagian Amerika Serikat wilayah selatan tahun 1982-1989 diestimasi dengan nilai dari komponen efek daya saing ekonomi regional (COM) negara bagian dijadikan sebagai variabel dependen dan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing regional dijadikan sebagai variabel independen yang terdiri dari *WAGE*, *TAX*, dan *COL*.

Berikut ini ditunjukkan model yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pajak daerah, pendidikan tenaga kerja, dan upah terhadap daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dengan menggunakan metode *pooled least squares* (PLS) data *cross section* dari delapan provinsi di Kawasan Timur Indonesia periode tahun 2000-2006 diestimasi dengan nilai dari komponen efek daya saing ekonomi regional (COM) provinsi Kawasan Timur Indonesia sebagai variabel dependen dan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing regional dijadikan sebagai variabel independen yang terdiri dari upah minimum provinsi (UMP), pajak daerah (PD), dan pendidikan tenaga kerja lulusan akademi dan perguruan tinggi (EDU). Efek daya saing regional (COM) dijadikan sebagai variabel dependen dikarenakan efek daya saing regional (COM) menggambarkan kemampuan daya saing dari suatu region yang berasal dari kondisi ekonomi region itu sendiri. Nilai dari komponen efek daya saing ekonomi regional (COM) mencerminkan kemampuan daya saing dan tingkat kompetitif sektor di tingkat region/provinsi. Jika nilai efek daya saing positif berarti sektor-sektor ekonomi ditingkat provinsi lebih kompetitif dibandingkan

sektor-sektor ekonomi tersebut di tingkat nasional, sebaliknya jika nilai efek ini negatif berarti sektor ekonomi ditingkat provinsi kurang kompetitif dibandingkan sektor-sektor ekonomi tersebut di tingkat nasional. Region/provinsi yang memiliki nilai efek daya saing positif menunjukkan bahwa region/provinsi tersebut mempunyai daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan region/provinsi lainnya yang nilai efek daya saingnya negatif. Formula dari model yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada persamaan (3.6).

$$COM = f(TAX, EDU, UMP) \quad (3.6)$$

dimana,

- COM = daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia
 TAX = pajak daerah masing-masing provinsi di KTI
 EDU = persentase tenaga kerja lulusan akademi dan perguruan tinggi masing-masing provinsi di KTI
 UMP = upah minimum provinsi masing-masing provinsi di KTI

Dari model fungsional dari persamaan (3.6) dapat ditulis secara model ekonometrik sebagai berikut :

$$COM_{it} = \alpha_0 + \beta_1 TAX_{it} + \beta_2 EDU_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.7)$$

dimana,

- COM = daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia
 TAX = pajak daerah masing-masing provinsi di KTI
 EDU = tenaga kerja lulusan akademi dan perguruan tinggi masing-masing provinsi di KTI
 UMP = upah minimum provinsi masing-masing provinsi di KTI
 α_0 = intercept
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi
 ε_t = error term
 i = provinsi di Kawasan Timur Indonesia
 t = waktu periode penelitian 2000-2006

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-

masing provinsi dan nasional dengan periode 2000-2006 atas harga konstan tahun 2000 dengan klasifikasi sembilan sektor yang terdiri dari sektor pertanian (S1); sektor pertambangan & penggalian (S2); sektor industri pengolahan (S3); sektor listrik, gas & air bersih (S4); sektor bangunan (5); sektor perdagangan, hotel & restoran (S6); sektor pengangkutan & komunikasi (S7); sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (S8); sektor jasa-jasa (S9). Kesembilan sektor tersebut dapat dibuat menjadi tiga sektor ekonomi, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer terdiri dari sektor pertanian (S1) dan sektor pertambangan & penggalian (S2). Sektor sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan (S3); sektor listrik, gas & air bersih (S4); sektor bangunan (5). Sektor tersier terdiri dari (S6); sektor pengangkutan & komunikasi (S7); sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan (S8); sektor jasa-jasa (S9). Data lainnya adalah Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Tenaga Kerja Lulusan Akademi dan Perguruan Tinggi dan Pajak Daerah.

Keseluruhan data-data ini diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari Bank Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI). Keseluruhan data tersebut bersifat data runtut waktu (*time series*) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 dan dengan *cross section* sebanyak delapan provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

3.3. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah efek daya saing regional (COM), dan yang menjadi variabel independen ada tiga variabel yaitu pajak daerah (PD), tenaga kerja berpendidikan akademi perguruan tinggi (EDU), dan upah minimum provinsi (UMP). Berikut ini dipaparkan defenisi operasional dari masing-masing variabel beserta dengan satuan ukurnya.

1. Efek daya saing regional (*regional competition effect*).

Efek daya saing regional (*regional competition effect*) adalah pertumbuhan atau penurunan ekonomi di suatu sektor di tingkat region akibat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi suatu sektor di daerah (region) dan pertumbuhan atau penurunan sektor yang sama di tingkat nasional dan dihitung secara tahunan. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Efek daya saing regional

menggambarkan daya saing dan tingkat kompetitif sektor di tingkat region. Jika nilai efek daya saing positif berarti sektor lokal lebih kompetitif dibandingkan sektor tersebut di tingkat nasional, sebaliknya jika nilai efek ini negatif berarti sektor lokal kurang kompetitif dibandingkan sektor tersebut di tingkat nasional. Satuan yang digunakan dalam milyar rupiah.

2. Pajak Daerah (*Tax*)

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan untuk variabel pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah yang menjadi variabel dalam penelitian adalah total penerimaan pajak daerah tahunan dari masing-masing provinsi pada periode waktu tahun 2000 – 2006. Satuan nilai yang digunakan adalah milyar rupiah.

3. Pendidikan Tenaga Kerja

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan untuk variabel pendidikan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan lulusan setara akademi dan perguruan tinggi. Satuan nilai yang digunakan adalah persentase tenaga kerja yang memiliki pendidikan lulusan setara akademi dan perguruan tinggi dari seluruh tenaga kerja seluruh sektor ekonomi pada tiap-tiap provinsi pertahun

4. Upah Minimum Provinsi

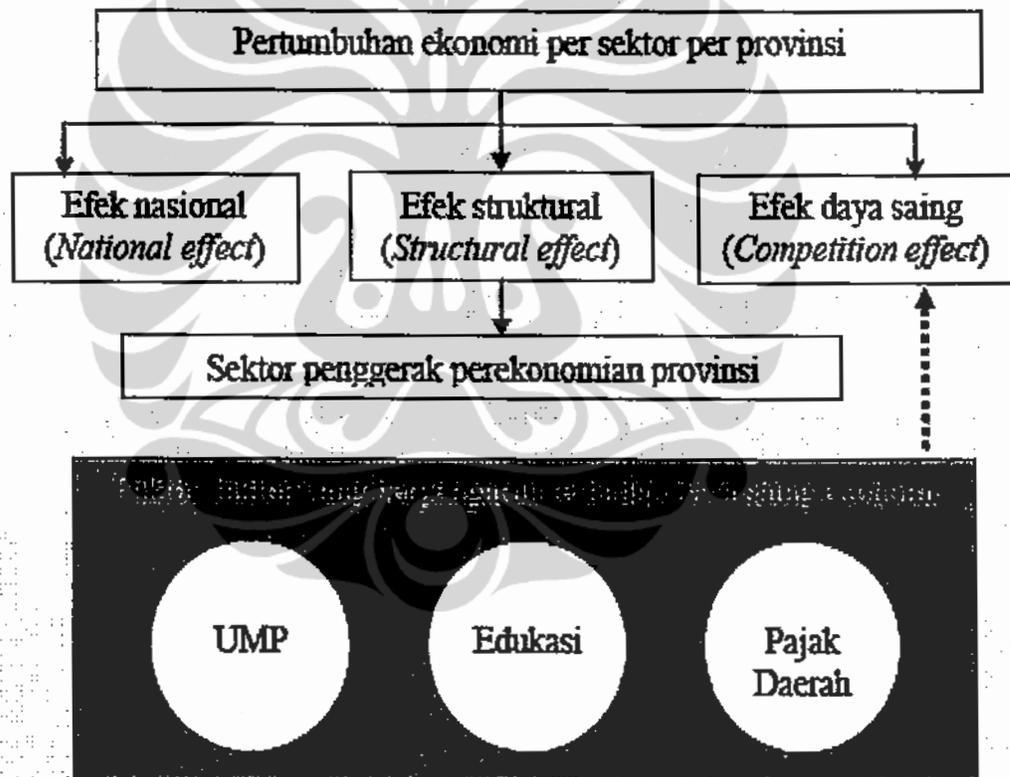
Upah Minimum Provinsi (UMP) atau dahulunya disebut Upah Minimum Regional (UMR) adalah tingkat upah tenaga kerja yang penentuan besarnya ditentukan pemerintah dengan penetapan Gubernur masing-masing di tiap daerah. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) bulanan yang berlaku sesuai dengan tahun periode penelitian. Satuan nilai yang digunakan adalah ribuan rupiah.

3.4. Kerangka Pikir Analisis

Gambar 3.1. menunjukkan proses alur pikir dalam menganalisis daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia. Perbedaan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh masing-masing provinsi di Kawasan Timur Indonesia

menunjukkan ada provinsi yang lebih kompetitif dan ada yang kurang kompetitif. Untuk mengkaji lebih jauh perbedaan performa ekonomi dari masing-masing provinsi di Kawasan Timur Indonesia, PDRB per sektor dan pertumbuhan ekonomi per sektor data *cross section* dari delapan provinsi di Kawasan Timur Indonesia periode tahun 2000-2006, diolah dengan menggunakan model analisis *shift-share* dinamis. Model analisis *shift-share* dinamis mendekomposisi pertumbuhan ekonomi masing-masing propinsi menjadi tiga komponen yaitu efek pertumbuhan nasional (N), efek struktural (I) dan efek daya saing regional (COM).

Gambar 3.1.
Diagram Kerangka Pikir Analisis



Hasil dari dekomposisi memberikan gambaran mengenai perkembangan transformasi struktur ekonomi dan memberikan gambaran kemampuan daya saing ekonomi regional. Melalui nilai efek struktural (*structural effect*) dan efek daya saing (*competition effect*) dapat diidentifikasi sektor-sektor potensial penggerak perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu propinsi.

Kemampuan daya saing regional dipengaruhi oleh tingkat upah (UMP), tingkat pendidikan tenaga kerja lulusan setara akademi dan atau universitas, dan besarnya pajak daerah. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh dari tingkat upah (UMP), tingkat pendidikan tenaga kerja lulusan setara akademi dan atau universitas, dan besarnya pajak daerah terhadap daya saing regional (*regional competition effect*) Kawasan Timur Indonesia, data *cross section* dari delapan provinsi di Kawasan Timur Indonesia periode tahun 2000-2006 diestimasi dengan menggunakan metode *pooled least squares* (PLS).

3.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Pemilihan pengambilan data pada tahun 2000-2006 dengan alasan bahwa dalam perhitungan data makro ekonomi nasional telah menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar dan pada periode waktu tersebut diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2001 serta adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005. Propinsi yang diamati sebanyak delapan provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Kedelapan provinsi ini merupakan provinsi-provinsi yang berada diwilayah Kawasan Timur Indonesia. Provinsi-provinsi lainnya yang baru muncul seperti Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat, tidak dimasukkan kedalam penelitian ini dikarenakan ketersediaan data dari provinsi tersebut sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan dimasukkan kedalam penelitian ini.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KAWASAN TIMUR INDONESIA

Dalam penelitian ini provinsi yang diamati hanya delapan provinsi. Provinsi lainnya yang relatif baru berdiri di awal tahun 2000an tidak memungkinkan untuk dimasukkan dalam penelitian ini dikarenakan terbatasnya data yang tersedia. Di bawah ini disajikan data-data dalam bentuk tabel dan grafik yang memberikan suatu gambaran umum performa perekonomian yang mempengaruhi daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh masing-masing provinsi di KTI dan nasional. Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode penelitian mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari yang dicapai nasional. Provinsi Sulawesi Utara lebih rendah dari nasional dan hanya pada periode 2005-2006 lebih tinggi dari nasional. Provinsi Sulawesi Selatan mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata yang positif walaupun pada periode tahun 2004-2005 mengalami pertumbuhan negatif hal ini terjadi juga pada provinsi Maluku di periode tahun 2000-2001.

Tabel 4.1
 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Nasional
 dan Kawasan Timur Indonesia Periode 2000-2006

Periode	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2000-06
SULUT	3.45	3.32	3.20	4.26	4.90	6.16	4.21
SULTENG	5.10	5.62	6.21	7.15	7.57	7.80	6.57
SULSEL	5.07	4.09	5.25	5.31	-2.33	6.72	4.02
SULTRA	5.01	6.66	7.57	7.51	7.31	7.68	6.96
NTB	7.42	3.51	3.90	6.25	1.82	1.98	4.15
NTT	4.73	4.88	4.57	4.77	3.42	5.08	4.57
MALUKU	-0.03	2.87	4.31	4.43	5.07	5.55	3.70
PAPUA	8.24	-12.60	-0.28	-22.53	36.40	-17.20	-1.33
NASIONAL	3.64	4.50	4.78	5.03	5.69	5.51	4.86

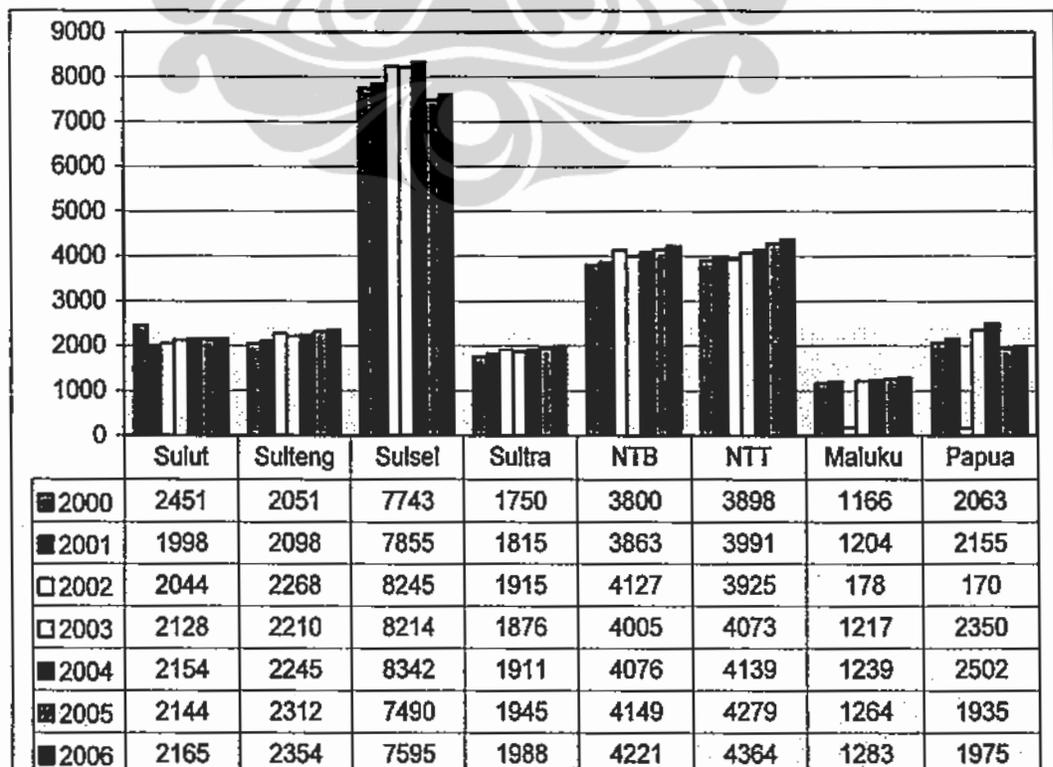
Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah.

Hampir seluruh provinsi KTI terjadi kenaikan kecuali provinsi Papua mengalami kemunduran ekonomi pada periode waktu penelitian. Pertumbuhan

negatif dialami pada periode 2001-2003 dan periode 2005-2006, kemunduran ekonomi terbesar terjadi pada periode 2003-2004 yaitu sebesar negatif 22,53 persen. Pengaruh kenaikan harga BBM pada tahun 2005 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional terjadi kontraksi sebesar 0,18 persen, dan pada provinsi di KTI hanya berdampak terhadap provinsi Papua, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar negatif 17,20 persen sedangkan untuk provinsi lainnya justru terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 4.1 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk provinsi di Kawasan Timur Indonesia periode tahun 2000-2006. Terlihat pada provinsi Sulut, Sulsel, dan Papua terjadi perubahan jumlah penduduknya dikarenakan adanya pemekaran wilayah. Provinsi Sulut dimekarkan menjadi dua provinsi yaitu provinsi Gorontalo. Kemudian provinsi Sulsel dimekarkan menjadi dua provinsi yaitu provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Papua sendiri menjadi dua provinsi yaitu provinsi Papua Barat. Pada tahun 2002 terlihat penduduk di provinsi Maluku berkurang sangat tajam, hal ini terjadi karena adanya pengungsian penduduk secara besar-besaran akibat terjadinya konflik horisontal pada provinsi tersebut.

Gambar 4.1
Penduduk Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia
Periode Tahun 2000 – 2006 (ribuan jiwa)

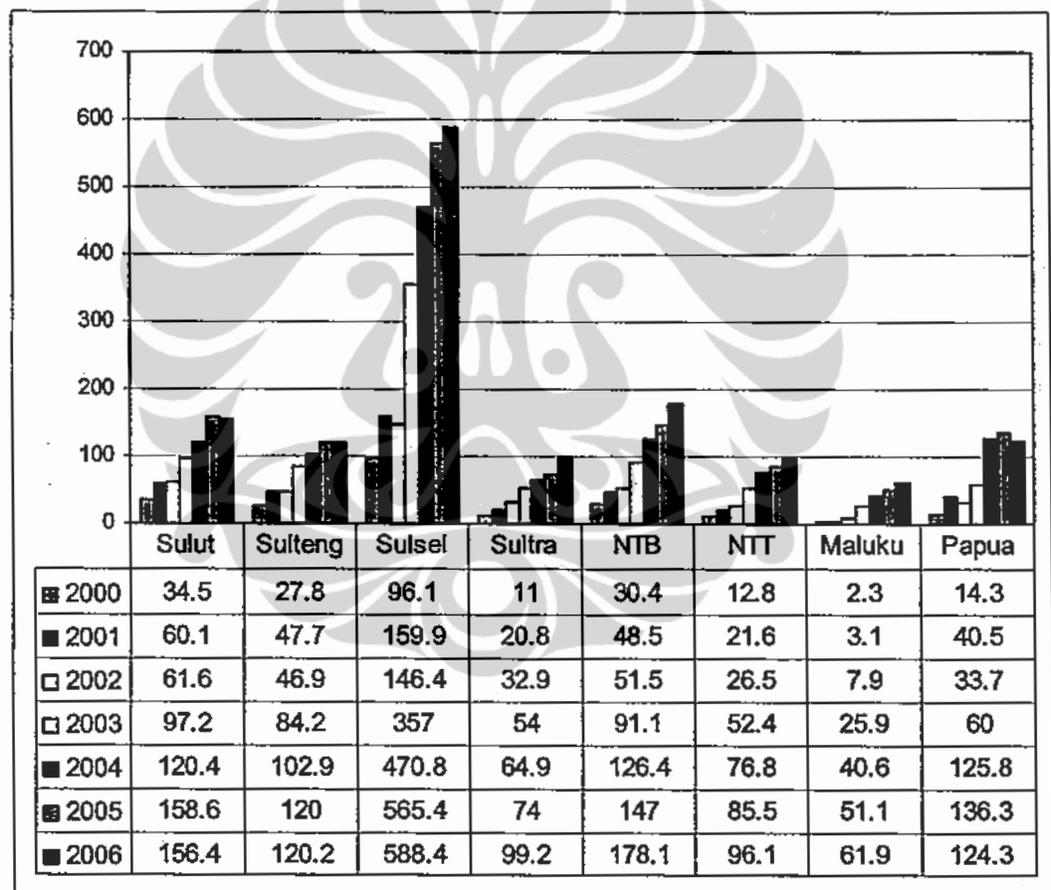


Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Analisis daya..., Audie Olate Niode, FE UI, 2008.

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), tapi pada sisi yang berbeda oleh para pengusaha dan investor menganggap besaran pajak menjadi satu faktor yang menentukan kesediaannya untuk melakukan investasi di daerah tersebut. Pada gambar 4.2 memperlihatkan perubahan penerimaan pajak daerah dari masing-masing provinsi di KTI. Sepanjang periode penelitian terlihat semua provinsi mencapai kenaikan penerimaan pajak daerah dengan tingkat yang bervariasi.

Gambar 4.2
Pajak Daerah Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia
Periode Tahun 2000 - 2006 (Rp milyar)



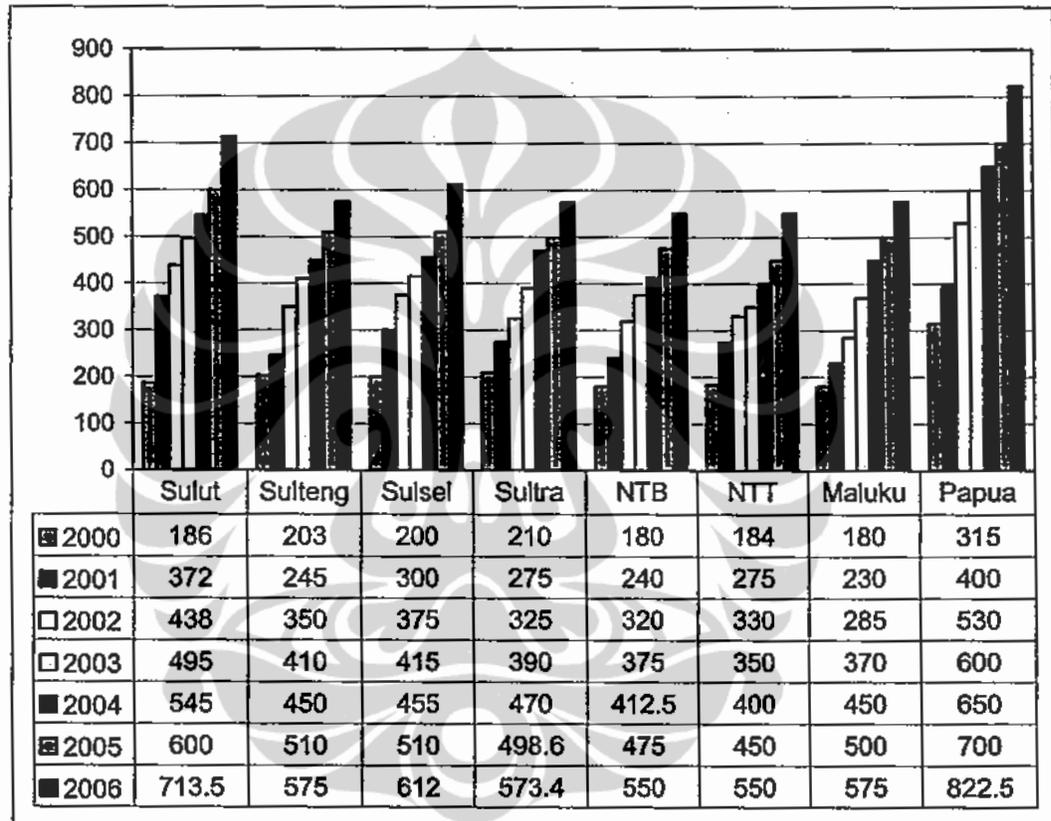
Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Dari gambar 4.3 dapat dilihat perkembangan tingkat upah minimum regional pada tiap-tiap provinsi di KTI. Upah minimum regional (UMR) seluruh provinsi terjadi kenaikan dengan tingkat berbeda dari tahun ketahun sepanjang periode penelitian. Tingkat UMR yang tertinggi adalah provinsi Papua diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara. Kenaikan tertinggi pada periode waktu penelitian dilakukan oleh provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 100 persen pada periode

2000-2001. Kalau dilihat persentasi kenaikan secara rata-rata provinsi Sulawesi Utara menempati urutan teratas sebesar 28,31 persen dan yang terendah provinsi Papua sebesar 17,10 persen. Kenaikan Tingkat UMR dari setiap daerah akan menjadi informasi penting bagi pelaku bisnis untuk melakukan investasinya.

Gambar 4.3

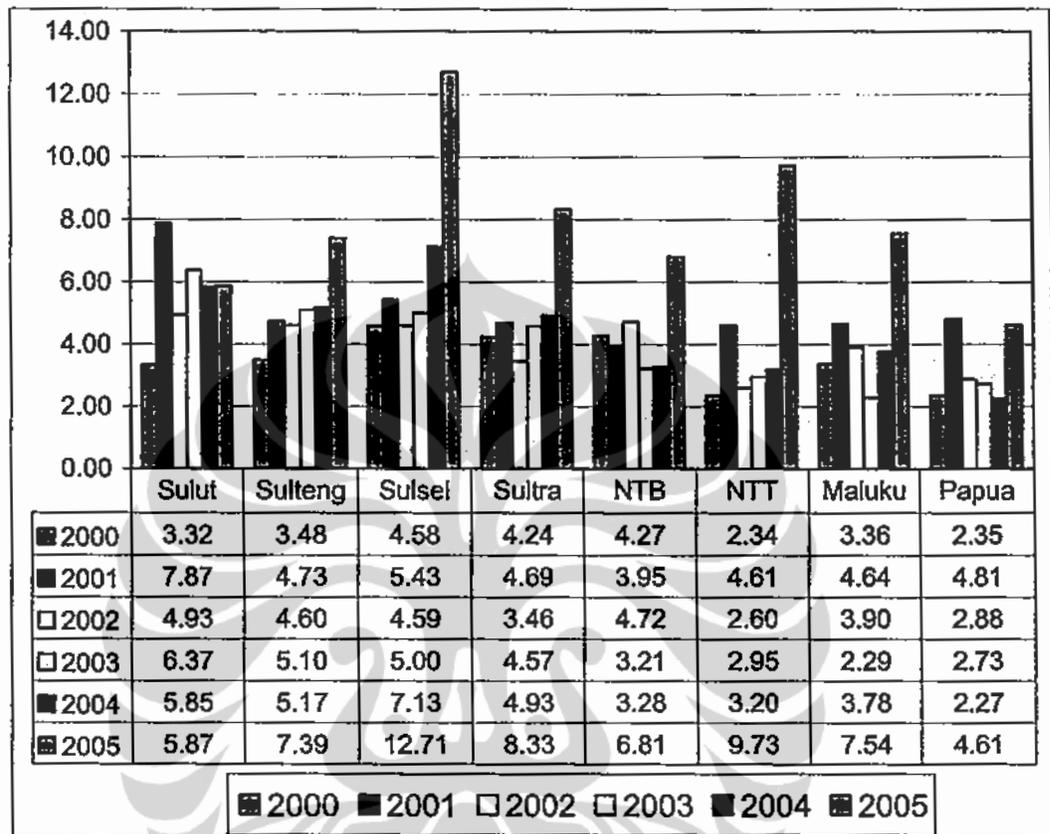
Upah Minimum Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia
Periode Tahun 2000 - 2006 (Rp ribuan)



Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Tingkat pendidikan tenaga kerja akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka tingkat produktivitas kerjanya akan semakin baik. Wilayah atau daerah yang memiliki sumber daya manusia yang baik akan menjadi daya tarik bagi para investor untuk melakukan aktivitas bisnisnya di daerah tersebut. Gambar 4.4 menunjukkan perkembangan proporsi tenaga kerja sebagai tenaga kerja lulusan akademi atau perguruan tinggi pada provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Terlihat adanya perkembangan yang bervariasi sepanjang periode waktu penelitian, pada umumnya keseluruhan provinsi terjadi peningkatan.

Gambar 4.4
Persentase Pendidikan Tenaga Kerja Di Provinsi
Kawasan Timur Indonesia Periode Tahun 2000 - 2005



Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

BAB V ANALISIS

5.1. Hasil Kalkulasi Model *Shift-Share* Dinamis

Data PDRB per sektor dan pertumbuhan ekonomi per sektor tiap tahun dari masing-masing kedelapan provinsi di KTI bersama dengan data pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan nasional per sektor secara tahunan, diolah dengan menggunakan model analisis *shift-share* dinamis mendekomposisi pertumbuhan ekonomi masing-masing propinsi menjadi tiga komponen yaitu efek pertumbuhan nasional (N), efek struktural (I) dan efek daya saing regional (COM).

Tabel 5.1
Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek
Provinsi-Provinsi KTI Tahun 2000-2006 (Rp milyar)

Provinsi	Efek Nasional	Efek Struktural	Efek Daya Saing	Total Efek
Sulut	3397	393	- 824	2964
Sulteng	2966	- 70	1143	4039
Sulsel	10140	- 488	- 1548	8104
Sultra	2011	- 29	887	2869
NTB	4078	- 885	152	3345
NTT	2598	- 42	- 141	2416
Maluku	867	51	- 247	671
Papua	6113	- 3798	- 6208	- 3893

Sumber : Hasil kalkulasi *shift-share*

Pada tabel 5.1 menunjukkan performa ekonomi yang dicapai secara keseluruhan dari kedelapan provinsi di KTI. Kolom kelima pada tabel adalah efek total yang merupakan penjumlahan efek nasional, efek struktural dan efek daya saing. Efek tersebut menunjukkan total kenaikan PDRB di setiap provinsi dari tahun 2000 sampai untuk tahun 2006. Hampir seluruh provinsi mengalami kenaikan PDRB, kecuali untuk provinsi Papua. Provinsi yang mencapai

peningkatan PDRB terbesar adalah provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian sebanyak sekitar Rp 8,104 triliun dan terkecil Provinsi Maluku dengan capaian Rp 671 milyar. Di sisi lain provinsi Papua mengalami penurunan PDRB sebesar Rp 3,894 triliun. Dari kedelapan provinsi tersebut ada dua provinsi yang menunjukkan total efeknya lebih besar dari efek nasional yaitu provinsi Sulteng dan Sultra. Keadaan ini mencerminkan bahwa provinsi tersebut secara keseluruhan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari yang dicapai di tingkat nasional.

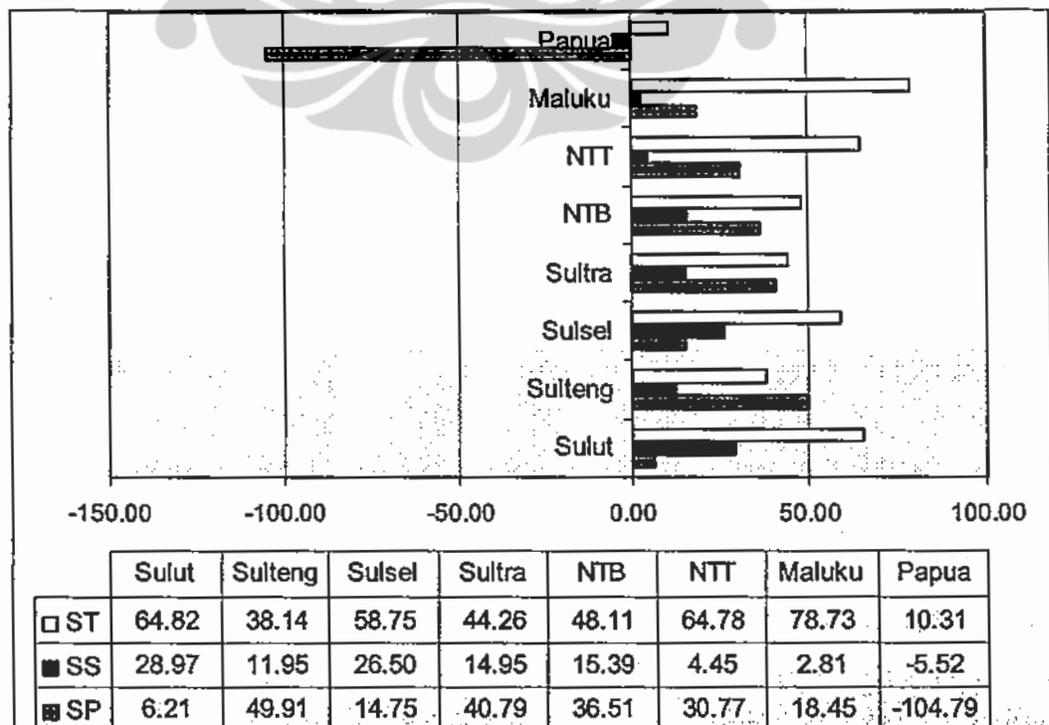
Pada kolom ketiga tabel 5.1 adalah efek struktural atau efek *industry mix*. Efek ini mengukur bagian dari total pendapatan atau pertumbuhan output dari suatu provinsi yang berdasarkan fakta bahwa laju pertumbuhan nasional untuk sektor-sektor terkonsentrasi pada provinsi lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional untuk semua sektor. Hal ini berarti bahwa jenis industri atau sektor-sektor yang berada di provinsi memiliki performa lebih baik atau buruk secara nasional dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan untuk semua sektor dalam ekonomi. Efek *industry mix* atau efek struktural akan menjadi positif atau negatif untuk suatu provinsi tergantung pada apakah ya atau tidaknya provinsi tersebut memiliki konsentrasi tinggi dari tinggi rendahnya pertumbuhan sektor-sektor ekonominya. Dari tabel tersebut mengindikasikan bahwa struktur industri mempunyai efek positif pada dua provinsi yaitu pada provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp 393 milyar dan Maluku sebesar Rp 51 milyar. Hal ini berarti bahwa performa pertumbuhan nasional dari sektor tersebut terkonsentrasi di provinsi Sulut dan Maluku lebih kuat dibandingkan rata-rata performa pertumbuhan untuk semua sektor dalam ekonomi nasional. Dengan demikian sektor-sektor di provinsi Sulut dan Maluku memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia.

Selanjutnya dari kolom 4 pada tabel 5.1 di atas dapat diketahui kemampuan daya saing regional dari kedelapan provinsi di KTI. Provinsi yang memiliki kemampuan daya saing regional tertinggi adalah provinsi Sulawesi Tengah kemudian Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat. Hal ini mengindikasikan ketiga provinsi tersebut kinerja ekonominya superior. Posisi daya saing terlemah adalah Papua kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, NTT. Kelima provinsi tersebut posisi daya saing regionalnya lemah dikarenakan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pada provinsinya masing-

masing lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di tingkat nasional, sehingga nilai efek daya saing regionalnya bernilai negatif. Hal ini memberikan dampak mengurangi pertambahan PDRB provinsi bersangkutan yang diperoleh dari kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional atau efek nasional. Pangurangan terbesar terjadi pada provinsi Papua sebesar Rp 3,983 triliun, diikuti provinsi Sulsel sebesar Rp 1,548 triliun, Sulut sebesar Rp 824 miliar, Maluku sebanyak Rp 247 milyar dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 141 milyar.

Peranan sektoral dalam pembentukan keseluruhan kenaikan PDRB pada provinsi di KTI selang periode tahun 2000-2006 dapat dilihat pada gambar 5.1. Dari gambar 5.1 terlihat dari delapan provinsi yang diamati provinsi Papua terjadi kemunduran ekonomi, sedangkan tujuh provinsi lainnya mencapai kemajuan ekonomi dengan tingkat yang berbeda. Dalam pembentukan PDRB di tujuh provinsi tersebut terlihat peranan sektor tersier sangat dominan, empat provinsi yang mendapat kontribusi dari sektor tersier lebih dari 50 persen yaitu Maluku, Sulut, Nusa Tenggara Timur, Sulsel dan tiga provinsi lainnya yaitu NTB, Sultra dan Sulteng lebih dari 40 persen. Peran sektor sekunder relatif rendah, kecuali pada provinsi Sulut dan Sulsel cukup menonjol. Dan sektor primer masih sangat besar peranannya untuk provinsi Sulteng, Sultra, NTB, NTT, dan Papua.

Gambar 5.1
PDRB 3 Sektor Provinsi Di KTI Tahun 2000 - 2006 (persen)



Sumber : Hasil kalkulasi *shift-share*

Selanjutnya di bawah ini akan ditunjukkan dan dibahas hasil kalkulasi *shift-share* dinamis dari masing-masing provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Tabel 5.2 menunjukkan performa perekonomian provinsi Sulawesi Utara selang waktu 2000-2006. Secara keseluruhan kenaikan PDRB provinsi Sulut sebesar sekitar Rp 2,964 triliun dengan kontribusi terbesar melalui efek nasional dengan nilai sebanyak Rp 3,397 triliun, dan dari efek struktural sebesar Rp 393 milyar, sedangkan dari efek daya saing regional bernilai negatif Rp 824 milyar.

Tabel 5.2
Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2006 (Rp milyar)

SEKTOR	N	I	COM	TOTAL
Pertanian	728	-249	186	665
Pertambangan & Pengegalian	225	-221	-484	-481
Industri Pengolahan	278	4	-114	167
Listrik, Gas & Air Bersih	25	8	-5	27
Bangunan	509	185	-29	665
Perdagangan, Hotel & Restoran	475	84	36	594
Pengangkutan & Komunikasi	387	536	-505	418
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan	201	66	288	555
Jasa-Jasa	570	-19	-196	355
TOTAL	3397	393	-824	2964

Sumber : Hasil kalkulasi *shift-share*

Kemudian untuk dapat menentukan sektor-sektor yang potensial untuk menjadi motor penggerak perekonomian daerah, yang perlu diperhatikan adalah nilai efek struktural dan efek daya saing. Secara keseluruhan nilai efek struktural ada enam sektor yang bernilai positif dan pada efek daya saing ada tiga sektor yang bertanda positif. Sektor yang mempunyai nilai kedua efek tersebut yang positif ada dua sektor yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Dari kedua sektor tersebut sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan yang memiliki nilai efek daya saing lebih besar dari nilai efek struktural, dengan demikian sektor inilah yang berpotensi untuk menjadi motor penggerak perekonomian di provinsi Sulawesi Utara. Kalau dilihat secara sektoral, dari sembilan sektor ada tujuh sektor

memberikan kontributif negatif terhadap pembentukan PDRB Sulut dan hanya dua sektor yang memberikan kontribusi positif yaitu sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Kedua sektor ini menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki daya saing yang baik sekaligus menandakan bahwa pertumbuhan kedua sektor ini lebih besar pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut di tingkat nasional. Dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan selang tahun 2000-2006, peranan sektor tersier memberikan kontribusi sebesar 65 persen dari total pertambahan PDRB provinsi Sulawesi Utara.

Dari tabel 5.3 terlihat bahwa provinsi Sulteng total pertambahan PDRB selang periode 2000-2006 sebesar Rp 4,039 triliun, dan kontribusi dari efek nasional sebesar 74 persen dan efek daya saing 28 persen sedangkan kontribusi dari efek industri adalah negatif (-2persen). Nilai efek daya saing yang positif memberikan informasi bahwa provinsi Sulteng adalah merupakan suatu region yang mempunyai daya saing ekonomi yang lebih baik terhadap provinsi-provinsi lainnya di KTI. Dari kesembilan sektor ekonomi ada dua sektor yang berpotensi menjadi sektor ekonomi penggerak perekonomian provinsi Sulteng, yaitu sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Peranan sektor primer mengambil porsi sampai 50 persen dalam pembentukan PDRB Sulteng.

Tabel 5.3

Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek
Provinsi Sulawesi Tengah 2000-2006 (Rp milyar)

SEKTOR	N	I	COM	TOTAL
Pertanian	1330	-463	1001	1868
Pertambangan & Penggalian	57	-55	146	148
Industri Pengolahan	213	1	-49	165
Listrik, Gas & Air Bersih	22	6	10	38
Bangunan	188	69	22	279
Perdagangan, Hotel & Retoran	375	67	82	524
Pangangkutan & Komunikasi	197	273	-201	268
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan	133	46	4	182
Jasa-Jasa	451	-13	129	567
TOTAL	2966	-70	1143	4039

Sumber : Hasil kalkulasi *shift-share*

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang mencapai kenaikan PDRB yang terbesar dari keseluruhan provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu sebesar Rp 8,104 triliun. Dari tabel 5.4 menunjukkan pertambahan PDRB ini terbentuk hanya dari efek nasional karena dua efek lainnya berkontribusi negatif, hal ini menunjukkan bahwa provinsi Sulsel memiliki daya saing yang lemah terhadap provinsi-provinsi lainnya di KTI. Dilihat dari efek daya saing, dari sembilan sektor hanya ada tiga sektor memiliki nilai positif, dan pada efek industri ada enam sektor bernilai positif. Untuk pembentukan PDRB provinsi Sulsel peranan sektor tersier yang tertinggi kemudian diikuti oleh sektor sekunder kemudian sektor primer.

Tabel 5.4
Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek
Provinsi Sulawesi Selatan 2000-2006 (Rp milyar)

SEKTOR	N	I	COM	TOTAL
Pertanian	3493	-1176	-2176	141
Pertambangan & Penggalian	938	-908	1024	1054
Industri Pengolahan	1344	5	141	1491
Listrik, Gas & Air Bersih	93	29	-19	103
Bangunan	441	161	-48	554
Perdagangan, Hotel & Restoran	1448	259	-143	1564
Pengangkutan & Komunikasi	726	1023	-638	1111
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan	500	160	468	1127
Jasa-Jasa	1157	-40	-158	959
TOTAL	10140	-488	-1548	8104

Sumber : Hasil kalkulasi *shift-share*

Tabel 5.5 menunjukkan performa ekonomi dari provinsi Sulawesi Tenggara. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pembentukan pertambahan PDRB selang tahun 2000-2006 mendapat kontribusi positif dari komponen efek daya saing, dari sembilan sektor hanya sektor pengangkutan dan komunikasi yang bernilai negatif. Delapan sektor ini menunjukkan kemampuan daya saing yang kuat terhadap sektor-sektor di provinsi lainnya di KTI.

Dari efek struktural secara keseluruhan memberikan kontributif negatif terhadap pembentukan PDRB walaupun ada enam sektor yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan sektor tersebut pada tingkat nasional.

Dalam pembentukan PDRB Sultra, sektor tersier dan sektor primer mengambil porsi yang sejajar masing-masing 40an persen.

Tabel 5.5

Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek
Provinsi Sulawesi Tenggara 2000-2006 (Rp milyar)

SEKTOR	N	I	COM	TOTAL
Pertanian	753	-262	474	965
Pertambangan & Penggalian	102	-100	203	205
Industri Pengolahan	164	1	7	172
Listrik, Gas & Air Bersih	12	3	16	31
Bangunan	157	57	12	225
Perdagangan, Hotel & Retoran	311	56	56	423
Pangangkutan & Komunikasi	140	196	-34	302
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan	87	28	152	268
Jasa-Jasa	283	-9	3	277
TOTAL	2011	-29	887	2869

Sumber : Hasil kalkulasi *shift-share*

Tabel 5.6

Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek
Provinsi Nusa Tenggara Barat 2000-2006 (Rp milyar)

SEKTOR	N	I	COM	TOTAL
Pertanian	1080	-367	-269	444
Pertambangan & Penggalian	1164	-1138	751	777
Industri Pengolahan	172	0	50	223
Listrik, Gas & Air Bersih	12	4	1	16
Bangunan	261	95	-80	275
Perdagangan, Hotel & Retoran	528	94	62	685
Pangangkutan & Komunikasi	280	389	-299	371
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan	159	52	144	355
Jasa-Jasa	422	-14	-209	199
TOTAL	4078	-885	152	3345

Sumber : Hasil kalkulasi *shift-share*

Provinsi Nusa Tenggara Barat selang waktu periode 2000-2006 terjadi penambahan PDRB sebesar Rp 3,345 triliun. Dari tabel 5.6 dapat dilihat bahwa yang menjadi sektor yang berpotensi sebagai motor penggerak perekonomian provinsi NTB adalah sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Sektor ekonomi yang paling menonjol kontribusinya terhadap PDRB dari komponen efek daya saingnya adalah sektor pertambangan & penggalian. Secara keseluruhan pembentukan PDRB provinsi NTB, kontribusi sektor tersier tertinggi dengan porsi 48 persen.

Tabel 5.7
Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2000-2006 (Rp milyar)

SEKTOR	N	I	COM	TOTAL
Pertanian	1122	-383	-11	728
Pertambangan & Penggalian	38	-37	15	15
Industri Pengolahan	43	0	-6	36
Listrik, Gas & Air Bersih	11	3	-5	9
Bangunan	189	68	-194	62
Perdagangan, Hotel & Retoran	391	69	-37	423
Pangangkutan & Komunikasi	163	226	-169	219
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan	78	27	-27	78
Jasa-Jasa	566	-16	295	845
TOTAL	2598	-42	-141	2416

Sumber : Hasil kalkulasi *shift-share*

Dari tabel 5.7 dapat diketahui performa perekonomian provinsi Nusa Tenggara Timur. Peranan kontribusi dari komponen daya saing menunjukkan hanya ada dua sektor yang bernilai positif dan secara keseluruhan total efek daya saingnya bernilai negatif, ini berarti provinsi NTT kemampuan daya saingnya relatif kecil. Peranan sektor pertanian dan sektor jasa-jasa sangat mendominasi pembentukan total PDRB provinsi NTT yaitu 30 persen dari sektor pertanian dan dari sektor jasa-jasa sebesar 35 persen. Selanjutnya dalam perkembangan perekonomian provinsi NTT dalam selang waktu periode penelitian tidak ada sektor-sektor ekonomi yang secara tegas dinyatakan sektor yang berpotensi menjadi penggerak perekonomian karena tidak ada sektor yang nilai efek daya saingnya lebih besar dari nilai efek industrinya. Pembentukan PDRB provinsi NTT sektor tersier mengambil porsi sebesar 65 persen dan sektor primer 31 persen

dan sektor sekunder hanya sekitar 4 persen. Keadaan ini menunjukkan di provinsi NTT sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan sektor bangunan relatif tertinggal atau belum berkembang.

Perkembangan perekonomian provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel 5.8 Secara keseluruhan pertambahan PDRB provinsi Maluku yang sebesar Rp 671 milyar relatif rendah di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi politik dan keamanan di wilayah tersebut dalam periode waktu penelitian belum stabil. Kondisi ini memberikan dampak terhadap kemampuan daya saingnya terhadap provinsi lainnya di KTI relatif kecil, ini terlihat dari kesembilan sektor ekonomi tidak ada yang berpotensi menjadi motor penggerak perekonomian, dan secara keseluruhan nilai efek daya saing negatif. Dalam pembentukan PDRBnya, sektor tersier sangat mendominasi dengan mengambil porsi sebesar 79 persen, dan sektor primer 18 persen sedangkan sekunder hanya sekitar 3 persen.

Tabel 5.8
Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek
Provinsi Maluku 2000-2006 (Rp milyar)

SEKTOR	N	I	COM	TOTAL
Pertanian	303	-102	-83	118
Pertambangan & Penggalian	7	-7	6	6
Industri Pengolahan	42	0	-32	11
Listrik, Gas & Air Bersih	5	2	-12	-5
Bangunan	11	4	-2	13
Perdagangan, Hotel & Retoran	209	37	-17	228
Pangangkutan & Komunikasi	76	105	-58	123
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan	48	17	-18	47
Jasa-Jasa	167	-5	-31	130
TOTAL	867	51	-247	671

Sumber : Hasil kalkulasi *shift-share*

Propvinsi Papua adalah provinsi yang mengalami kemunduran ekonomi. Dari tabel 5.9 dapat dilihat total efeknya bernilai negatif. Pada komponen efek daya saing, kesembilan sektor ekonominya bernilai negatif, ini menunjukkan bahwa provinsi Papua kemampuan daya saing ekonominya rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia. Sektor-sektor ekonomi yang

memberikan kontribusi perekonomian yang positif hanya sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel & restoran, dan sektor pengangkutan, juga sektor jasa-jasa.

Tabel 5.9

Efek Nasional, Efek Struktural, Efek Daya Saing, dan Total Efek
Provinsi Papua 2000-2006 (Rp milyar)

SEKTOR	N	I	COM	TOTAL
Pertanian	927	-301	-1013	-388
Pertambangan & Penggalian	3846	-3946	-3593	-3692
Industri Pengolahan	159	3	-512	-350
Listrik, Gas & Air Bersih	11	4	-15	0
Bangunan	252	90	-207	135
Perdagangan, Hotel & Restoran	279	46	-226	98
Pengangkutan & Komunikasi	212	291	-138	366
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan	70	29	-215	-116
Jasa-Jasa	357	-14	-289	53
TOTAL	6113	-3798	-6208	-3894

Sumber : Hasil kalkulasi *shift-share*

5.2. Sektor-Sektor Berpotensi Penggerak Perekonomian

Dari hasil kalkulasi *shift-share* diperoleh sektor-sektor yang berpotensi sebagai motor penggerak perekonomian pada masing-masing provinsi. Dari tabel 5.10 dapat ditemukan pada provinsi Sulut sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan yang menjadi sektor berpotensi. Pada provinsi Sulteng adalah sektor listrik, gas & air bersih, dan sektor perdagangan, hotel & restoran berperan sebagai sektor berpotensi. Untuk provinsi Sulsel ada sektor yang berpotensi, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Provinsi Sultra memiliki tiga sektor yang berpotensi yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas & air bersih, dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Pada provinsi NTB terdapat dua sektor yaitu sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan.

Dari kedelapan provinsi yang diamati dalam penelitian ini terdapat tiga provinsi yang belum adanya sektor-sektor yang berpotensi menjadi motor penggerak perekonomian provinsinya masing-masing, yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Pada provinsi NTT dan Papua terlihat efek struktural dan efek daya saingnya, keduanya bertanda negatif yang menunjukkan kemajuan ekonominya sangat bergantung pada tingkat pertumbuhan nasional.

Sedangkan provinsi maluku nilai efek daya saingnya negatif yang mengindikasikan tingkat daya saingnya lemah, dan dibandingkan dengan provinsi lainnya provinsi Maluku terkecil kenaikan PDRBnya selang waktu 2000-2006.

Tabel 5.10

Sektor-Sektor Berpotensi Penggerak Perekonomian Provinsi di KTI

Sektor Ekonomi	Sulut	Sulteng	Sulsel	Sultra	NTB	NTT	Maluku	Papua
Pertanian								
Pertambangan & Penggalian								
Industri Pengolahan								
Listrik, Gas & Air Bersih								
Bangunan								
Perdagangan, Hotel & Retoran								
Pangangkutan & Komunikasi								
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan								
Jasa-Jasa								

Sumber : Hasil kalkulasi *shift-share*

5.3. Hasil Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional

Estimasi terhadap model daya saing ekonomi regional dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 5.11 di bawah ini. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa keseluruhan variabel pajak daerah (TAX), pendidikan tenaga kerja (EDU), dan upah (UMP) tidak berpengaruh. Hal ini didasarkan pada tidak signifikan ketiga variabel tersebut, walaupun untuk variabel upah koefisiennya sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 5.11

Rincian Hasil Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional

COM	=	498.14	-	0.94	TAX_{it}	+	22.11	EDU_{it}	-	1.75	UMP_{it}	+	eit
t-stat		0.67		-0.39			0.19						-0.99
Prob :		0.51		0.69			0.85						0.33
Adjusted R-squared	:	-0.031											
F-stat :		0.53		F(prob) :									0.66
DW	:	3.48											

Sumber : Hasil pengolahan data, Eviews 5.1

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang baik dalam proses estimasi dilakukan penggunaan metode estimasi dengan *cross section weight*. Penggunaan *cross section* ini juga untuk menghilangkan adanya heterokedastisitas dalam model. Pada tabel 5.12 menunjukkan hasil estimasi model daya saing ekonomi regional yang telah digunakan metode estimasi dengan *cross section weight* pada model tersebut. Dari hasil pengujian hipotesis uji t, menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (TAX) memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan 10persen dan pendidikan tenaga kerja (EDU) memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan 10persen. Untuk variabel upah (UMP) walaupun memiliki koefisien negatif, tapi tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya F-stat 5.22 mengindikasikan persamaan tersebut signifikan pada level 1persen. Hasil uji F pada model tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel bebas yaitu pajak daerah (TAX), pendidikan tenaga kerja (EDU), dan upah (UMP) berpengaruh signifikan terhadap daya saing ekonomi regional (COM) pada tingkat kepercayaan 1persen. Nilai DW-stat sebesar 2.07 pada model ini juga mengindikasikan tidak terdapat masalah autokorelasi pada model.

Tabel 5.12
Rincian Hasil Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional
Dengan Metode Cross-Section Weights

COM	=	84.20	-	1.65	TAX <i>it</i>	+	15.01	EDU <i>it</i>	-	0.27	UMP <i>it</i>	+	eit
t-stat		1.13		-1.92			1.84			-0.85			
Prob :		0.26		0.06			0.07			0.40			
Adjusted R-squared	:	0.21											
F-stat :		5.22			F(prob) :		0.003						
DW	:	2.07											

Sumber : Hasil pengolahan data, Eviews 5.1

5.4. Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi ini dimaksudkan untuk membandingkan antara hasil estimasi model dengan kaidah teori yang berlaku, apakah sesuai atau tidak. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap setiap hasil estimasi model persamaan tersebut. Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil estimasi model daya

saing ekonomi regional yang telah menggunakan *cross section weight* dapat dilihat pada tabel 5.12

5.4.1. Pajak Daerah

Dari tabel 5.12 diperoleh hasil bahwa variabel pajak daerah (TAX) memiliki pengaruh yang negatif terhadap daya saing ekonomi regional, berarti semakin besar perubahan pajak daerah maka perubahan daya saing ekonomi regional semakin menurun. Nilai koefisien pajak daerah sebesar negatif 1.65 menunjukkan bahwa jika perubahan pajak daerah berubah satu milyar dan variabel lainnya dianggap konstan, maka daya saing ekonomi regional (COM) menurun dengan terjadi pengurangan Rp 1,65 milyar

Penurunan kemampuan daya saing tercermin dari perubahan negatif tingkat pertumbuhan yang dicapai oleh suatu daerah. Menurut Mankiw (2000), pajak akan mempengaruhi insentif perusahaan untuk mengakumulasi modal atau insentif investasi. Berbagai bentuk pemungutan pajak terhadap perusahaan akan menghambat investasi. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kim (1997)¹¹ di Korea menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Korea. Dalam studi dari Helms (1985), dengan menggunakan data panel menemukan bahwa kenaikan pada pajak daerah akan memberikan dampak memperlambat pertumbuhan ekonomi ketika penerimaan digunakan untuk membiayai transfer. Akan tetapi, kalau penerimaan digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan pengembangan jasa-jasa publik, pajak daerah akan mempunyai pengaruh yang menguntungkan terhadap perekonomian regional.

5.4.2. Pendidikan Tenaga Kerja

Koefisien variable pendidikan tenaga kerja (EDU) pada tabel 5.12 adalah sebesar 15.01, hal ini berarti kalau jumlah tenaga kerja berubah naik sebesar 1persen maka daya saing ekonomi regional akan meningkat dan menaikkan PDRB sebesar Rp 15,01 milyar. Tingkat pendidikan tenaga kerja akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka tingkat produktivitas kerjanya akan semakin baik, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

¹¹ dikutip dari Mulyadi (2005)

Hal ini sesuai dengan apa yang diperoleh dalam penelitian Denison (1962)¹², ditemukan 23 persen pertumbuhan output di Amerika Serikat pada kurun waktu 1929-1957 dapat dijelaskan oleh adanya peningkatan pendidikan tenaga kerja. Kemampuan produktivitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikannya, dengan demikian semakin banyak tenaga kerja berpendidikan akademi/ perguruan tinggi, maka output yang dihasilkan semakin besar, kue PDRB membesar terjadi tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat positif.

5.4.3. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Dari tabel 5.12 di ketahui koefisien UMP negatif, akan tetapi secara statistik tidak signifikan sehingga pengaruh dari upah minimum provinsi (UMP) tidak dapat dijelaskan dengan baik. Secara teoritis kenaikan upah dengan sendirinya akan membebani para pelaku bisnis, karena hal tersebut akan meningkatkan biaya produksi dan mengurangi perolehan laba perusahaan yang selanjutnya akan mengurangi daya tarik untuk melakukan reinvestasi dan juga menjadi tidak menarik bagi investor lainnya untuk berinvestasi di daerah tersebut. Implikasinya akan berdampak buruk terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga berpotensi untuk meningkatkan pengangguran. Dalam teori ekonomi, upah tenaga kerja yang semakin tinggi memungkinkan untuk mengurangi laju pertumbuhan tenaga kerja atau dengan kata lain akan meningkatkan pengangguran. Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Wilayah atau daerah yang tingkat penganggurannya tinggi mengindikasikan daya saing ekonominya relatif rendah.

¹² dikutip dari Subroto (1997)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- Provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia, dari delapan provinsi hanya tiga provinsi yang memiliki daya saing ekonomi regional sedangkan lima provinsi lainnya kurang mempunyai daya saing ekonomi regional. Provinsi Sulawesi tengah yang paling kompetitif, provinsi Sulawesi Tenggara di posisi kedua dan provinsi Nusa Tenggara Barat di posisi ketiga. Provinsi yang terkecil kemampuan daya saing ekonominya yaitu provinsi Papua kemudian Sulawesi Selatan diikuti Sulawesi Utara, Maluku, NTT.
- Kenaikan PDRB yang dicapai oleh provinsi di KTI pada periode waktu 2000-2006 sangat dipengaruhi dan bergantung pada efek pertumbuhan nasional, terbesar terjadi di provinsi Sulawesi Selatan diikuti Provinsi Papua kemudian Sulawesi Utara. Sedangkan untuk provinsi Sulteng dan Sultra serta NTB menunjukkan adanya kemampuan yang berasal dari kemampuan ekonomi masing-masing provinsi tersebut.
- Efek Struktural atau efek mix industri yang menunjukkan kemampuan peranan sektor-sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB di masing-masing provinsi, dari kedelapan provinsi di KTI hanya berlangsung pada provinsi Sulawesi Utara dan Maluku, sedang pada provinsi lainnya masih belum berperan dalam pembentukan PDRB.
- Secara keseluruhan sektor-sektor yang berpotensi menjadi motor penggerak perekonomian pada provinsi di KTI adalah sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan yang paling menonjol diikuti sektor industri pengolahan kemudian sektor listrik, gas dan air bersih, dan selanjutnya sektor Perdagangan, hotel & restoran.
- Sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel & restoran; sektor pengangkutan & komunikasi; sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa, menjadi sektor-sektor yang sangat berperan kontribusinya terhadap kenaikan pendapatan regional domestik bruto (PDRB) selang waktu 2000-2006. Hal ini menunjukkan bahwa di KTI pada selang waktu tersebut terjadi pertumbuhan ekonomi modern.

- Pajak daerah (TAX) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemampuan daya saing ekonomi regional Kawasan Timur.
- Pendidikan tenaga (EDU) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatkan kemampuan daya saing ekonomi regional Kawasan Timur, sedangkan upah (UMP) tidak dapat dijelaskan pengaruhnya terhadap kemampuan daya saing.

5.2. Saran

- Untuk meningkatkan kemampuan daya saing ekonomi regional Kawasan Timur Indonesia perlu upaya serius pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi berkaitan dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan yang dibuat.
- Pemerintah pusat dan daerah harus tetap komit untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan anggaran pendidikan dan kualitas mutu pendidikan formal maupun nonformal.
- Kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah bukanlah semata-mata hanya untuk menaikkan penerimaannya akan tetapi harus mengstimulir iklim ramah investasi.
- Kebijakan dalam penentuan upah minimum provinsi harus memperhatikan aspek produktivitas kerja, dengan kata lain upah boleh meningkat dibarengi dengan meningkatnya produktivitas kerja.
- Di masa mendatang dalam penelitian selanjutnya, kesimpulan hasil penelitian akan lebih kuat apabila periode waktu ditambah dan jumlah cross sectionnya diperbesar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, N. 2006. Materi Kuliah: Dekomposisi Pertumbuhan Regional: Shift-Share. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia.
- Baltagi, B. H. 2003. *Econometric Analysis of Panel Data*, Second Edition, John Wiley & Sons, LTD, The Atrium, Southern Gate, Chichester West Sussex PO198SQ, England.
- Barff, R. A. and Prentice L. Knight III. 1988. *Dynamic Shift-Share Analysis. Growth and Change*, vol. 19, no2, p.1-10 .
- Bollman, R. D. dan Bryden J. M. (1997). *Rural Employment: an International perspective*, CAB International, Wallingford: UK
- Berzeg, Korhan. 1978. *The Empirical Content of Shift-Share Analysis. Journal of Regional Science*. Vol. 18, no. 3, p. 463-469.
- Brodjonegoro, P. Bambang. 2006. *Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah. Makalah dalam SATE FEUI Jakarta.*
- Case, E. K. dan Fair C. Ray. 2004. *Principles of Economics*, Edisi Bahasa Indonesia, PT Indeks, Jakarta.
- Chenery, H. B. dan Sirquyn M. 1975. *Patterns of Development 1950-1970*. London : Oxford University.
- Curtis, Wayne C. 1972. *Shift-Share Analysis as a Technique in Rural Development. American Journal of Agricultural Economics*, 54(2) : 267-270.
- Denison, E. F. (1962). *The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternative before Us*.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Dornbusch, Rudiger; Stanley Fischer and Richard Startz. 2001. *Macroeconomics*. McGraw-Hill Companies, Inc. New York.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*, Fourth Edition. New York: McGraww-Hill International Edition.
- Helms, Jay L. 1985. *The Effect of State and Local Taxes on Economic Growth: A Time Series – Cross Section Approach*. Dalam Wallace E Oates (Ed) *The Economics of Fiscal Federalism and Local Finance*. Edward Elgar, Centelham, United Kingdom.
- Igusa, Kunio. 1991. *Regional Development and Investment Opportunity: An Analysis on Possibility for Local Industrialization*. Report on Joint Research Project between LP3E-KADIN (Jakarta) and IDE (Tokyo).

- Jhingan, M. L. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Bahasa Indonesia. CV Rajawali. Jakarta.
- Khusaini, 2004. *Analisis Disparitas Antar Daerah Kabupaten/Kota dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Propinsi Banten*. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kim, Sung Tai. 1997. *The Role of Local Public Sectors in Regional Economic Growth in Korea*. *Asian Economic Journal*, Vol 11 No. 21.
- Kuznets, S. (1966). *Modern Economic Growth*.
- Kusumastuti, R. 2007. *Perubahan Daya Saing dan Struktur Ekspor Hasil Industri Provinsi-Provinsi di Indonesia*. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mankiw, N. Gregory. 1997. *Macroeconomics*, 3rd Ed. New York: Worth Publisher, Inc.
- Mulyadi, R. 2005. *Peranan Pengeluaran dan Penerimaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia tahun 1991-1999*. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nachrowi, D. Nachrowi dan Usman Hardius. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit FEUI.
- Reiljan, J.; Hinrikus M. dan Ivanov A. 2000. *Key Issues in Defining and Analysing the Competitiveness of a Country*. Working Paper on the Framework of Grant No. 3974 of Estonian Science Foundation. Tartu University Press : University of Tartu.
- Richardson, H. W. 1978. *The State of Regional Economics: a Survey*. *International Regional Science Review* 3:1-48.
- Schultz, T. W. (1961). *Investment in Human Capital*. *AER*.
- Seyfried, William. 2006. *Examining The Economic Competitiveness of The Economies of Southern United States*. www.westga.edu/~bquest/1996/sefried.html.
- Setyobudi, Dwi. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekspor Sektor Industri Pemintalan, Tekstil dan Kulit Pada Perekonomian dan Distribusi Pendapatan : Pengamatan Dengan Structural Path Analysis SNSE Indonesia 1998 dan 2003*. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sintawaty, N. (2004). *Analisis Mengenai Disparitas Alokasi Investasi Regional di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Periode 1995-1999*. FE Universitas Pajajaran. Bandung.

- Subroto, G. 1998. Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi : Suatu Analisis Runtun Waktu di Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sulistina, 2006. Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi Per Sektor di Dua Puluhan Tujuh Propinsi di Indonesia, Pendekatan Model Shift-Share Tradisional dan Stokastik. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Susanti, Hera; Ikhsan M. dan Widyanti. 2000. Indikator-indikator Makroekonomi. Edisi Kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Thirwall, A. 1967. A Measure of the Proper Distribution Industry, Oxford Economics Paper 1.
- Tiepo, M. G. N. dan Burns M. 2004. Measuring Competitiveness, New Rural Economy Project, Phase 2 NRE.
- Todaro, M. P. 2000. Economic Development. Harlow: Addison-Wesley.
- Widarjono, A. 2007. Ekonometrika, Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Kedua, Ekonosia, Yogyakarta.
- Zikri, M. 2005. Analisis Persaingan Ekspor Produk Manufaktur dengan Negara ASEAN dan China di Pasar Amerika Serikat. Makalah dalam SATE FEUI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. Data Pendapatan Nasional Indonesia 1993-2006
- Badan Pusat Statistik. Data Keadaan Tenaga Kerja 1993-2006
- Badan Pusat Statistik. Data Statistik Upah 1993-2006
- Badan Pusat Statistik. Data APBD 2000-2006
- UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- , 2005. Eviews 5.1 User's Guide. Quantitative Micro Software. LLC

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Delapan Provinsi KTI
Periode Tahun 2000 – 2006 (Rp milyar)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Sulawesi Utara	10565	10929	11291	11653	12150	12745	13530
Pertanian	2243	2330	2434	2455	2617	2778	2908
Pertambangan & Pengegalian	1192	794	754	693	668	663	712
Industri Pengolahan	877	929	955	995	955	977	1044
Listrik, Gas & Air Bersih	75	79	81	83	85	97	102
Bangunan	1456	1562	1656	1779	1888	1983	2121
Perdagangan, Hotel & Restoran	1408	1482	1546	1626	1730	1858	2003
Pengangkutan & Komunikasi	1159	1223	1265	1321	1412	1494	1577
Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	339	673	698	729	769	812	893
Jasa-Jasa	1816	1857	1903	1971	2026	2083	2171

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Sulawesi Tengah	8649	9090	9600	10197	10925	11752	12669
Pertanian	3775	4018	4293	4613	4972	5292	5643
Pertambangan & Pengegalian	172	176	182	188	195	244	320
Industri Pengolahan	660	685	712	739	758	787	825
Listrik, Gas & Air Bersih	59	64	71	78	84	90	98
Bangunan	551	578	609	644	688	755	830
Perdagangan, Hotel & Restoran	1099	1152	1209	1284	1376	1494	1623
Pengangkutan & Komunikasi	586	608	636	665	718	783	854
Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	392	407	427	450	489	530	574
Jasa-Jasa	1355	1402	1463	1536	1646	1778	1922

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Sulawesi Selatan	30763	32324	33645	35411	37291	36422	38868
Pertanian	11661	11772	12313	12404	12321	11338	11803
Pertambangan & Pengegalian	2837	3003	2887	3206	3498	3649	3891
Industri Pengolahan	3991	4219	4345	4689	4981	5112	5482
Listrik, Gas & Air Bersih	266	298	316	334	331	342	368
Bangunan	1234	1347	1433	1522	1684	1712	1788
Perdagangan, Hotel & Restoran	4207	4557	4776	5094	5420	5386	5771
Pengangkutan & Komunikasi	1834	2022	2138	3267	2636	2758	2946
Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	1213	1299	1408	1705	2198	2153	2340
Jasa-Jasa	3521	3807	4028	4090	4222	3971	4479

Lampiran 1 (lanjutan)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Sulawesi Tenggara	5775	6064	6468	6958	7480	8027	8643
Pertanian	2163	2279	2444	2595	2798	2991	3128
Pertambangan & Penggalian	229	216	277	420	423	459	433
Industri Pengolahan	584	565	543	553	562	579	757
Listrik, Gas & Air Bersih	30	32	35	38	48	56	61
Bangunan	447	487	516	538	576	617	672
Perdagangan, Hotel & Retoran	883	959	1034	1050	1145	1247	1306
Pangangkutan & Komunikasi	354	399	435	484	550	601	656
Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	212	225	248	307	363	395	479
Jasa-Jasa	874	902	935	973	1017	1080	1151

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Nusa Tenggara Barat	12182	13085	13544	14073	14953	15225	15527
Pertanian	3554	3533	3577	3743	3841	3877	3998
Pertambangan & Penggalian	3203	3866	4001	4012	4368	4201	3980
Industri Pengolahan	501	529	560	597	635	681	724
Listrik, Gas & Air Bersih	34	36	38	40	43	44	50
Bangunan	779	814	852	901	952	1003	1054
Perdagangan, Hotel & Retoran	1538	1647	1732	1825	1930	2062	2223
Pangangkutan & Komunikasi	814	857	914	968	1032	1107	1185
Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	391	423	466	563	654	691	745
Jasa-Jasa	1369	1379	1403	1425	1499	1559	1567

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Nusa Tenggara Timur	7851	8222	8622	9017	9447	9770	10266
Pertanian	3533	3645	3782	3887	4023	4060	4261
Pertambangan & Penggalian	122	124	127	130	131	135	138
Industri Pengolahan	130	135	141	148	154	159	166
Listrik, Gas & Air Bersih	32	34	35	36	38	40	41
Bangunan	622	625	638	650	659	677	684
Perdagangan, Hotel & Retoran	1163	1213	1292	1361	1427	1495	1587
Pangangkutan & Komunikasi	476	492	520	558	606	647	696
Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	238	244	252	259	281	306	315
Jasa-Jasa	1534	1710	1836	1988	2128	2251	2378

Lampiran 1 (lanjutan)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Maluku	2769	2768	2848	2970	3102	3259	3440
Pertanian	1012	1000	1010	1029	1058	1097	1129
Pertambangan & Penggalian	22	24	24	25	26	27	28
Industri Pengolahan	150	139	139	142	147	152	160
Listrik, Gas & Air Bersih	24	17	15	16	17	18	20
Bangunan	32	33	35	37	39	42	44
Perdagangan, Hotel & Retoran	635	655	683	720	757	802	863
Pangangkutan & Komunikasi	232	211	226	257	288	319	354
Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	144	150	159	169	175	181	191
Jasa-Jasa	520	539	556	575	594	621	650

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Papua	22283	24119	21079	21019	16283	22209	18389
Pertanian	3609	3964	2805	2940	2922	3063	3221
Pertambangan & Penggalian	13539	14834	14419	13918	8872	14349	9847
Industri Pengolahan	832	869	399	422	436	452	483
Listrik, Gas & Air Bersih	42	44	30	33	36	38	42
Bangunan	902	949	742	799	869	935	1036
Perdagangan, Hotel & Retoran	1021	1097	802	873	943	1021	1119
Pangangkutan & Komunikasi	648	723	574	687	783	891	1014
Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan	417	239	182	191	224	241	302
Jasa-Jasa	1273	1400	1126	1156	1198	1220	1326

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nasional (Rp milyar)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pertanian	216831	223891	231613	240387	247164	253882	262403
Pertambangan & Penggalian	167692	168244	169932	167604	160100	165223	168029
Industri Pengolahan	385598	398324	419388	441755	469952	491561	514100
Listrik, Gas & Air Bersih	8394	9058	9868	10349	10898	11584	12251
Bangunan	76573	80080	84469	89622	96334	103598	112234
Perdagangan, Hotel & Retoran	224452	233308	243267	256517	271142	293654	312521
Pangangkutan & Komunikasi	65012	70276	76173	85458	96897	109261	124976
Keu, Persewaan & Js Perusahaan	115463	123266	131523	140374	151123	161252	170074
Jasa-Jasa	129754	133957	138982	145105	152906	160799	170705

Lampiran 3 : Persentase Pertumbuhan PDRB Per Sektor Ekonomi Provinsi KTI
Periode Tahun 2000 - 2006

SULUT	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	rata2
Pertanian	3.88	4.46	0.87	6.61	6.15	4.67	4.44
Pertambangan & Penggalian	-33.43	-5.04	-8.08	-3.59	-0.72	7.27	-7.26
Industri Pengolahan	5.94	2.85	4.13	-3.94	2.23	6.86	3.01
Listrik, Gas & Air Bersih	4.78	3.02	2.45	2.39	13.82	5.28	5.29
Bangunan	7.24	6.04	7.43	6.08	5.06	6.97	6.47
Perdagangan, Hotel & Retoran	5.27	4.27	5.22	6.37	7.41	7.78	6.05
Pangangkutan & Komunikasi	5.52	3.40	4.47	6.84	5.83	5.56	5.27
Keu, Persewaan & Js Perusahaan	98.76	3.67	4.46	5.39	5.64	10.03	21.33
Jasa-Jasa	2.28	2.49	3.58	2.79	2.79	4.21	3.02

SULTENG	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	rata2
Pertanian	6.44	6.85	7.46	7.79	6.42	6.64	6.93
Pertambangan & Penggalian	2.32	3.18	3.27	3.68	25.43	31.10	11.50
Industri Pengolahan	3.87	3.94	3.80	2.56	3.82	4.80	3.80
Listrik, Gas & Air Bersih	7.98	10.51	9.69	7.46	8.07	8.13	8.64
Bangunan	4.91	5.34	5.76	6.85	9.79	9.87	7.09
Perdagangan, Hotel & Retoran	4.74	4.98	6.20	7.15	8.59	8.65	6.72
Pangangkutan & Komunikasi	3.79	4.45	4.69	7.88	9.04	9.13	6.50
Keu, Persewaan & Js Perusahaan	3.85	4.95	5.45	8.71	8.28	8.35	6.60
Jasa-Jasa	3.45	4.32	5.00	7.18	7.98	8.13	6.01

SULSEL	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	rata2
Pertanian	0.95	4.60	0.74	-0.67	-7.98	4.10	0.29
Pertambangan & Penggalian	5.84	-3.86	11.05	9.12	4.32	6.63	5.52
Industri Pengolahan	5.73	2.98	7.90	6.23	2.65	7.22	5.45
Listrik, Gas & Air Bersih	12.10	6.21	5.56	-0.80	3.41	7.55	5.67
Bangunan	9.20	6.34	6.24	10.64	1.66	4.41	6.42
Perdagangan, Hotel & Retoran	8.32	4.81	6.66	6.40	-0.62	7.14	5.45
Pangangkutan & Komunikasi	10.23	5.76	52.78	-19.32	4.63	6.81	10.15
Keu, Persewaan & Js Perusahaan	7.03	8.46	21.07	28.92	-2.07	8.72	12.02
Jasa-Jasa	8.13	5.82	1.52	3.23	-5.94	12.80	4.26

SULTRA	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	rata2
Pertanian	5.37	7.26	6.15	7.84	6.91	4.57	6.35
Pertambangan & Penggalian	-5.68	28.60	51.28	0.65	8.75	-5.69	12.99
Industri Pengolahan	-3.28	-3.84	1.76	1.69	3.05	30.59	5.00
Listrik, Gas & Air Bersih	9.33	7.71	10.22	24.23	17.86	7.61	12.83
Bangunan	8.99	6.06	4.30	6.92	7.25	8.83	7.06
Perdagangan, Hotel & Retoran	8.64	7.79	1.51	9.03	8.98	4.69	6.77
Pangangkutan & Komunikasi	12.64	9.12	11.15	13.57	9.40	9.16	10.84
Keu, Persewaan & Js Perusahaan	6.22	10.10	23.84	18.25	8.80	21.47	14.78
Jasa-Jasa	3.23	3.64	4.11	4.53	6.15	6.61	4.71

Lampiran 3 (lanjutan)

NTB	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	rata2
Pertanian	-0.60	1.25	4.64	2.63	0.94	3.11	1.99
Pertambangan & Penggalian	20.72	3.49	0.26	8.87	-3.81	-5.26	4.04
Industri Pengolahan	5.67	5.88	6.49	6.35	7.29	6.35	6.34
Listrik, Gas & Air Bersih	5.80	7.03	3.05	8.11	4.04	13.26	6.88
Bangunan	4.47	4.59	5.86	5.61	5.31	5.16	5.17
Perdagangan, Hotel & Retoran	7.11	5.15	5.35	5.75	6.84	7.80	6.33
Pangankutan & Komunikasi	5.34	6.67	5.83	6.66	7.29	7.00	6.46
Keu, Persewaan & Js Perusahaan	8.28	10.18	20.77	16.07	5.70	7.90	11.48
Jasa-Jasa	0.77	1.73	1.59	5.16	4.01	0.55	2.30

NTT	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	rata2
Pertanian	3.16	3.76	2.78	3.50	0.92	4.96	3.18
Pertambangan & Penggalian	1.13	2.50	2.43	0.92	2.79	2.14	1.99
Industri Pengolahan	3.78	4.67	4.72	4.62	3.09	4.42	4.22
Listrik, Gas & Air Bersih	6.18	2.95	2.22	4.62	6.70	2.04	4.12
Bangunan	0.53	2.00	1.94	1.42	2.61	1.10	1.60
Perdagangan, Hotel & Retoran	4.24	6.56	5.31	4.85	4.76	6.15	5.31
Pangankutan & Komunikasi	3.23	5.80	7.23	8.66	6.80	7.48	6.53
Keu, Persewaan & Js Perusahaan	2.82	2.92	3.06	8.21	9.14	2.97	4.85
Jasa-Jasa	11.50	7.36	8.29	7.03	5.78	5.67	7.61

MALUKU	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	rata2
Pertanian	-1.17	0.98	1.95	2.80	3.63	2.97	1.86
Pertambangan & Penggalian	8.19	3.26	3.63	3.01	3.58	4.14	4.30
Industri Pengolahan	-7.06	0.22	1.93	3.45	3.62	5.22	1.23
Listrik, Gas & Air Bersih	-28.60	-15.36	8.88	7.79	6.17	7.24	-2.31
Bangunan	6.23	5.64	5.63	5.36	5.77	6.73	5.89
Perdagangan, Hotel & Retoran	3.20	4.27	5.34	5.20	5.98	7.60	5.26
Pangankutan & Komunikasi	-8.94	7.24	13.78	12.05	10.61	11.18	7.65
Keu, Persewaan & Js Perusahaan	4.26	5.76	6.37	3.58	3.91	5.03	4.82
Jasa-Jasa	3.63	3.24	3.31	3.36	4.46	4.74	3.79

PAPUA	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	rata2
Pertanian	9.84	-29.24	4.82	-0.62	4.82	5.16	-0.87
Pertambangan & Penggalian	9.56	-2.80	-3.47	-36.26	61.74	-31.38	-0.43
Industri Pengolahan	4.39	-54.06	5.87	3.21	3.64	6.79	-5.03
Listrik, Gas & Air Bersih	5.73	-31.62	9.38	7.41	8.01	8.74	1.28
Bangunan	5.28	-21.84	7.64	8.85	7.53	10.86	3.06
Perdagangan, Hotel & Retoran	7.48	-26.92	8.87	8.06	8.20	9.63	2.55
Pangankutan & Komunikasi	11.63	-20.60	19.68	13.97	13.74	13.76	8.70
Keu, Persewaan & Js Perusahaan	-42.74	-23.86	5.01	17.03	7.66	25.25	-1.94
Jasa-Jasa	9.95	-19.55	2.67	3.62	1.80	8.76	1.21

Lampiran 4 : Persentase Pertumbuhan PDB Per Sektor Ekonomi Nasional
Periode Tahun 2000 - 2006

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	rata2
Pertanian	3.26	3.45	3.79	2.82	2.72	3.36	3.23
Pertambangan & Penggalian	0.33	1.00	-1.37	-4.48	3.20	1.70	0.06
Industri Pengolahan	3.30	5.29	5.33	6.38	4.60	4.59	4.91
Listrik, Gas & Air Bersih	7.92	8.94	4.87	5.30	6.30	5.76	6.51
Bangunan	4.58	5.48	6.10	7.49	7.54	8.34	6.59
Perdagangan, Hotel & Retoran	3.95	4.27	5.45	5.70	8.30	6.42	5.68
Pangangkutan & Komunikasi	8.10	8.39	12.19	13.38	12.76	14.38	11.53
Keu, Persewaan & Js Perusahaan	6.76	6.70	6.73	7.66	6.70	5.47	6.67
Jasa-Jasa	3.24	3.75	4.41	5.38	5.16	6.16	4.68

Lampiran 5 : Hasil Regresi
Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional

Dependent Variable: COM?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/20/08 Time: 12:21
Sample: 2000 2005
Included observations: 6
Cross-sections included: 8
Total pool (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TAX?	-0.938963	2.402353	-0.390851	0.6978
EDU?	22.10534	116.6084	0.189569	0.8505
UMP?	-1.749812	1.773901	-0.986420	0.3293
C	498.1414	744.4100	0.669176	0.5069
R-squared	0.034935	Mean dependent var		-147.4650
Adjusted R-squared	-0.030865	S.D. dependent var		1408.555
S.E. of regression	1430.127	Akaike info criterion		17.44857
Sum squared resid	89991553	Schwarz criterion		17.60450
Log likelihood	-414.7657	F-statistic		0.530931
Durbin-Watson stat	3.476664	Prob(F-statistic)		0.663432

Lampiran 6 : Hasil Regresi dengan Metode Cross-Section Weights
Estimasi Model Daya Saing Ekonomi Regional

Dependent Variable: COM?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 07/20/08 Time: 02:11

Sample: 2000 2005

Included observations: 6

Cross-sections included: 8

Total pool (balanced) observations: 48

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TAX?	-1.654111	0.861478	-1.920084	0.0613
EDU?	15.01540	8.142865	1.843995	0.0719
UMP?	-0.269582	0.317606	-0.848794	0.4006
C	84.20362	74.32713	1.132879	0.2634

Weighted Statistics

R-squared	0.262595	Mean dependent var	-129.6121
Adjusted R-squared	0.212318	S.D. dependent var	1108.817
S.E. of regression	978.4362	Sum squared resid	42122846
F-statistic	5.222907	Durbin-Watson stat	2.075460
Prob(F-statistic)	0.003586		

Unweighted Statistics

R-squared	-0.603519	Mean dependent var	-147.4650
Sum squared resid	91597951	Durbin-Watson stat	3.411503